

BAB II

LANDASAN TEORI

Landasan teori memuat teori-teori atau konsep-konsep dasar, yang diambil dari buku-buku acuan yang langsung berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti sebagai tuntunan, untuk memecahkan masalah penelitian dan untuk merumuskan hipotesis.

Pada landasan teori akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan judul tesis ini, yaitu organisasi dan sistem informasi, strategi SI dan strategi TI, perencanaan strategis SI/TI, metodologi perencanaan strategis SI/TI, analisis strategis, metode dan dan teori analisis perencanaan strategis SI/TI, e-government, tinjauan perencanaan strategis SI/TI dari beberapa organisasi pemerintah, yang kemudian dilanjutkan dengan perbandingan antar dokumen perencanaan strategis SI/TI dari beberapa organisasi pemerintah, dan terakhir adalah kerangka umum perencanaan strategis SI/TI.

Penjelasan lebih lanjut tentang landasan teori yang telah disebutkan akan dibahas pada sub bab dibawah ini.

2.1 Organisasi dan Sistem Informasi

Secara substansi definisi SI dan TI tidak berbeda satu dengan yang lain. Secara umum SI didefinisikan sebagai suatu keterkaitan antar manusia, prosedur, dan penggunaan Teknologi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan,

menyebarkan, dan menyajikan informasi yang digunakan oleh sebuah atau lebih proses bisnis dalam organisasi. Sedangkan TI adalah konvergensi antara teknologi computer dan teknologi komunikasi yang menyebabkan SI dapat dibangun dan berjalan (Laudon and Laudon, 2004).

Ada tiga sasaran utama dari upaya penerapan SI/TI dalam suatu organisasi. Pertama, memperbaiki efisiensi kerja dengan melakukan otomasi berbagai proses yang mengelola informasi. Kedua, meningkatkan keefektifan manajemen dengan memuaskan kebutuhan informasi guna pengambilan keputusan. Ketiga, memperbaiki daya saing atau meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi dengan merubah gaya dan cara berbisnis (Ward and Peppard, 2002).

Namun sering ditemukan bahwa penerapan TI kurang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja dan kesuksesan bisnis organisasi maupun peningkatan daya saing organisasi. Hal tersebut terjadi akibat penerapan SI/TI yang hanya berfokus pada teknologinya saja. Oleh karena itu, cara efektif untuk mendapatkan manfaat strategis dari penerapan SI/TI adalah dengan berkonsentrasi pada kaji ulang bisnis (*rethinking business*) melalui analisis masalah bisnis saat ini dan perubahan lingkungannya serta mempertimbangkan TI sebagai bagian solusi (Earl, 1992).

Permasalahan di dalam penerapan SI/TI pada suatu organisasi dapat dikatakan sebagai paradoks produktivitas (Roach, 1994). Dimana didalam penerapan SI/TI sudah diimplementasikan secara baik, namun dari sisi lain seperti halnya keamanan, sumber daya manusia, transparansi, dan lain-lain bersifat sebaliknya. Sebagai contoh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah

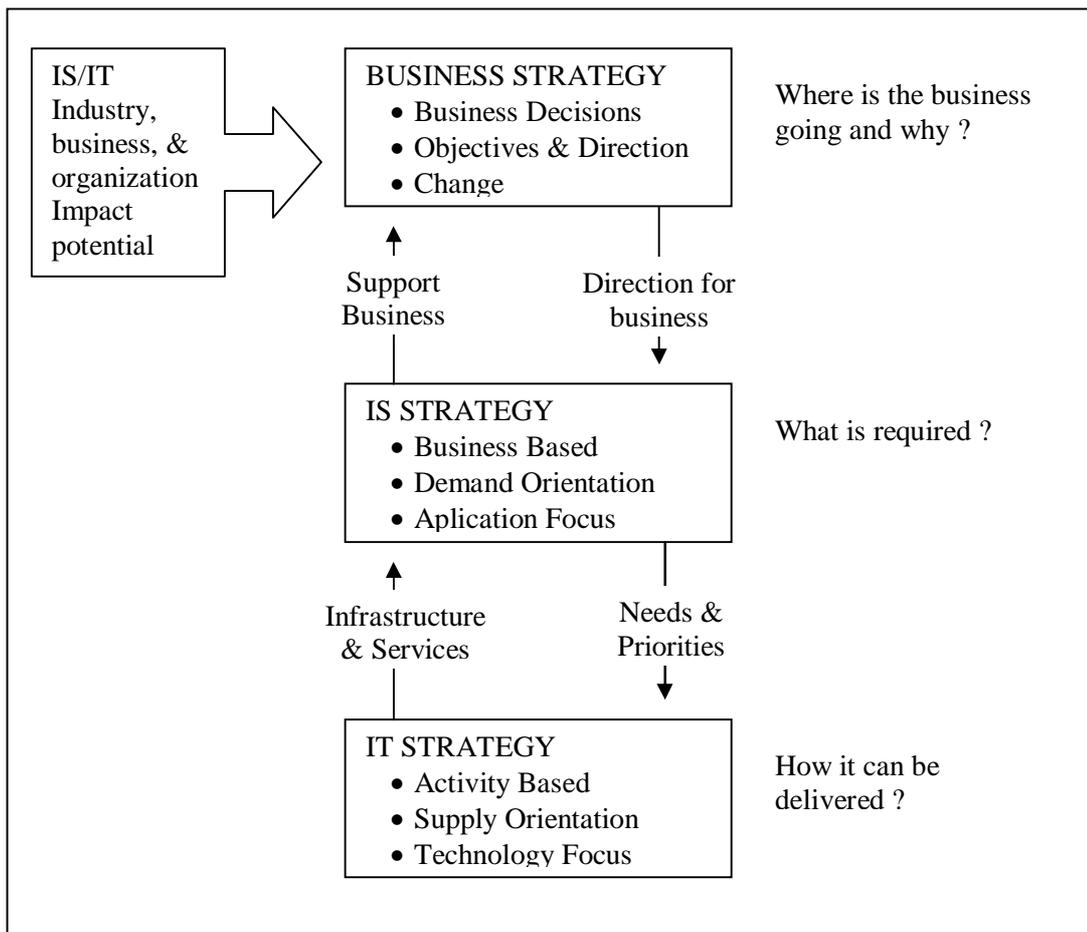
menginvestasikan sedikitnya Rp. 200 milyar untuk pengadaan perangkat dan aplikasi SI/TI dengan harapan agar penghitungan suara hasil pemilu dapat berjalan dengan cepat, akurat dan transparan. Dalam beberapa hal penayangan hasil perhitungan suara sudah memenuhi kriteria kecepatan yang diinginkan, namun demikian akurasi dan transparansi masih menjadi persoalan yang berbuntut pada keraguan terhadap masih diperlukannya SI/TI dalam pemilu-pemilu berikutnya. Jika ditambahkan dengan persoalan rentannya sistem keamanan yang melekat pada SI/TI KPU, belum tersedianya komputer dan jaringan komunikasi secara merata di seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kecamatan, serta persoalan manajemen sistem informasi yang dinilai masih tidak standar, dapat diperkirakan persoalan paradok produktivitas SI/TI di KPU makin menjadi nyata.

Permasalahan lain dalam penerapan SI/TI adalah investasi SI/TI masih belum berhasil memberikan manfaat yang diharapkan kepada organisasi (Ward and Peppard, 2002). Pimpinan perusahaan sering dihadapkan pada kenyataan bahwa belanja modal (*capital expenditure*) untuk SI/TI tidak membuahkan hasil hingga nilai tertentu sesuai dengan besarnya investasi yang telah dilakukan. Perusahaan menggunakan SI/TI untuk pengelolaan akuntansi dan keuangan, operasional pemasaran, layanan pelanggan, koordinasi antar kantor cabang, perencanaan produksi, pengendalian persediaan, mengurangi *lead time*, melancarkan distribusi dan lain sebagainya. Namun tidak jelas apakah penggunaan SI/TI semacam ini sudah secara nyata menghasilkan output yang lebih banyak (Robert Solow dalam McCarty, 2001).

2.2 Strategi SI dan Strategi TI

Bila kita mengharapkan agar penerapan TI optimal, dibutuhkan suatu strategi SI/TI yang selaras dengan strategi bisnis organisasi. Hal ini diperlukan agar investasi yang dikeluarkan untuk TI sesuai dengan kebutuhan dan memberi manfaat yang diukur dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Earl membedakan antara strategi SI dan TI (Earl, 1997). Strategi SI menekankan pada penentuan aplikasi sistem informasi yang dibutuhkan organisasi. Esensi dari strategi SI adalah menjawab pertanyaan “apa?”. Sedangkan strategi TI lebih menekankan pada pemilihan teknologi, infrastruktur, dan keahlian khusus yang terkait atau menjawab pertanyaan “bagaimana?”. Sebagai contoh suatu organisasi menerapkan *Executive Information System* pada bidang pemasaran hal ini mempengaruhi aliran informasi vertikal dalam perusahaan. Pihak manajemen atas memiliki akses informasi yang lebih besar dan mengurangi ketergantungan sumber informasi terhadap manajemen menengah. Jaringan telekomunikasi sebagai aplikasi teknologi informasi memungkinkan informasi mengalir dengan mudah dan cepat di antara departemen dan divisi yang berbeda. Hubungan antara strategi TI, strategi SI dan strategi bisnis terlihat pada gambar dibawah ini:



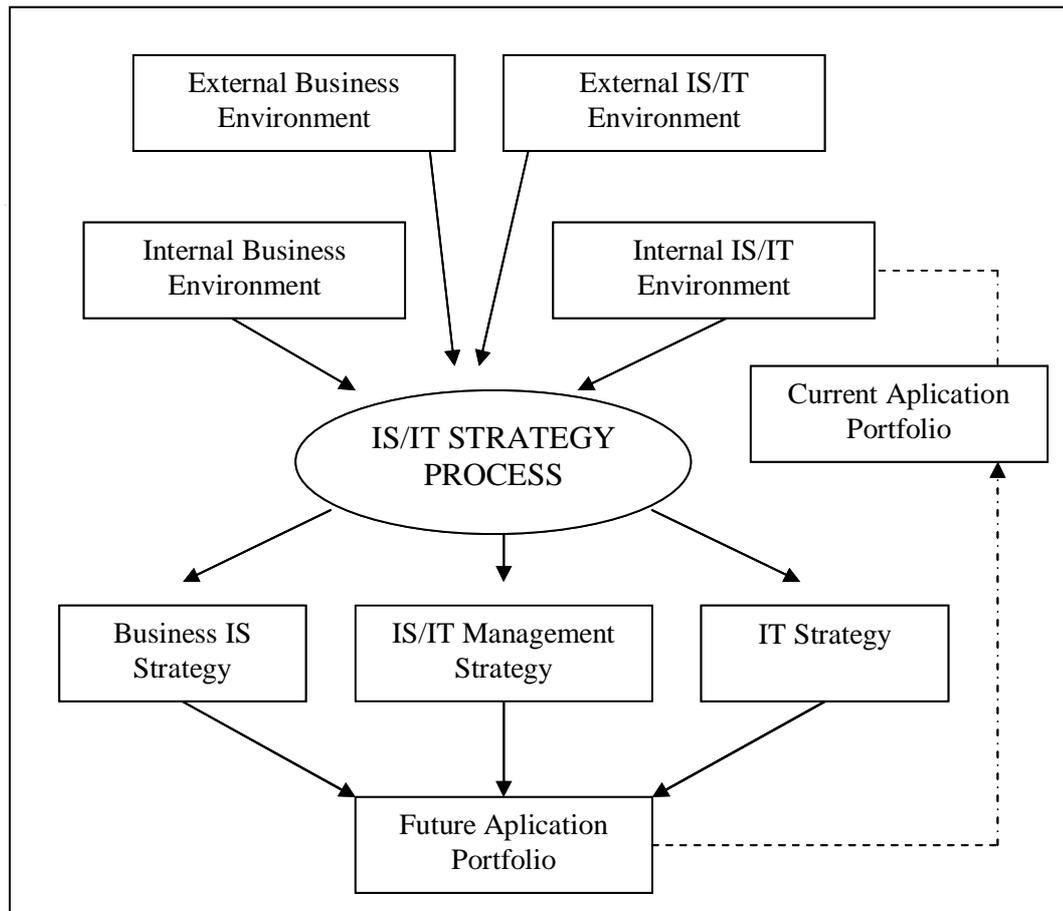
Gambar 2.1 Hubungan antara Strategi Bisnis, Strategi SI, dan Strategi TI
[Ward & Peppard, 2002]

Untuk menentukan strategi SI/TI yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi organisasi, maka perlu pemahaman tentang strategi bisnis organisasi. Pemahaman tersebut mencakup penjelasan terhadap hal-hal berikut : mengapa suatu bisnis dijalankan, kemana tujuan, dan arah bisnis, kapan tujuan tersebut dicapai, bagaimana cara mencapai tujuan dan adakah perubahan yang harus dilakukan. Jadi dalam membangun suatu strategi SI/TI, yang menjadi isu sentral adalah penyelarasan (*alignment*) strategi SI/TI dengan strategi bisnis organisasi.

2.3 Perencanaan Strategis SI/TI

Perencanaan strategis SI/TI merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi SI berbasis komputer yang akan mendukung organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Perencanaan strategis SI/TI mempelajari pengaruh SI/TI terhadap kinerja bisnis dan kontribusi bagi organisasi dalam memilih langkah-langkah strategis. Selain itu, perencanaan strategis SI/TI juga menjelaskan berbagai tools, teknik, dan kerangka kerja bagi manajemen untuk menyelaraskan strategi SI/TI dengan strategi bisnis, bahkan mencari kesempatan baru melalui penerapan teknologi yang inovatif (Ward & Peppard, 2002). Gambar dibawah menunjukkan skema perencanaan strategis SI/TI Ward dan Peppard.

Beberapa karakteristik dari perencanaan strategis SI/TI antara lain adalah adanya misi utama : Keunggulan strategis atau kompetitif dan kaitannya dengan strategi bisnis; adanya arahan dari eksekutif atau manajemen senior dan pengguna; serta pendekatan utama berupa inovasi pengguna dan kombinasi pengembangan *bottom up* dan analisa *top down* (Pant & Hsu, 1995).



Gambar 2.2 Model Strategis SI/TI [Ward & Peppard 2002]

2.4 Metodologi Perencanaan Strategis SI/TI

Faktor penting dalam proses perencanaan strategis SI/TI adalah penggunaan metodologi. Metodologi merupakan kumpulan dari metode, teknik, dan *tools* yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu. Tujuan dari penggunaan metodologi dalam perencanaan strategis SI/TI adalah untuk meminimalkan resiko kegagalan, memastikan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan serta meminimalkan ketergantungan individu, dan lebih menekankan kepada proses dan sasaran yang ditentukan. Ada beberapa metodologi perencanaan strategis SI/TI

yang populer dan berikut ini adalah bahasan tentang metodologi perencanaan strategis SI/TI yang dikenal luas yaitu metodologi perencanaan strategis SI/TI versi *Ward dan Peppard*, versi *Wetherbe*, versi *James Martin*, versi *Tozer*, dan *Price Waterhouse*.

2.4.1 Metodologi Perencanaan Strategis SI/TI versi Ward dan Peppard

Pendekatan metodologi ini dimulai dari kondisi investasi SI/TI dimasa lalu yang kurang bermanfaat bagi tujuan bisnis organisasi dan menangkap peluang bisnis, serta fenomena meningkatkan keunggulan kompetitif suatu organisasi karena mampu memanfaatkan SI/TI dengan maksimal. Kurang bermanfaatnya investasi SI/TI bagi organisasi disebabkan karena perencanaan strategis SI/TI yang lebih fokus ke teknologi, bukan berdasarkan kebutuhan bisnis.

Metodologi versi ini terdiri dari tahapan masukan dan tahapan keluaran (Ward & Peppard, 2002). Tahapan masukan terdiri dari:

1. Analisis lingkungan bisnis internal, yang mencakup aspek-aspek strategi bisnis saat ini, sasaran, sumber daya, proses, serta budaya nilai-nilai bisnis organisasi.
2. Analisis lingkungan bisnis eksternal, yang mencakup aspek-aspek ekonomi, industri, dan iklim bersaing perusahaan.
3. Analisis lingkungan SI/TI internal, yang mencakup kondisi SI/TI organisasi dari perspektif bisnis saat ini, bagaimana kematangannya (*maturity*), bagaimana kontribusi terhadap bisnis, keterampilan sumber daya manusia,

sumber daya dan infrastruktur teknologi, termasuk juga bagaimana portofolio dari SI/TI yang ada saat ini.

4. Analisis lingkungan SI/TI eksternal, yang mencakup tren teknologi dan peluang pemanfaatannya, serta penggunaan SI/TI oleh kompetitor, pelanggan dan pemasok.

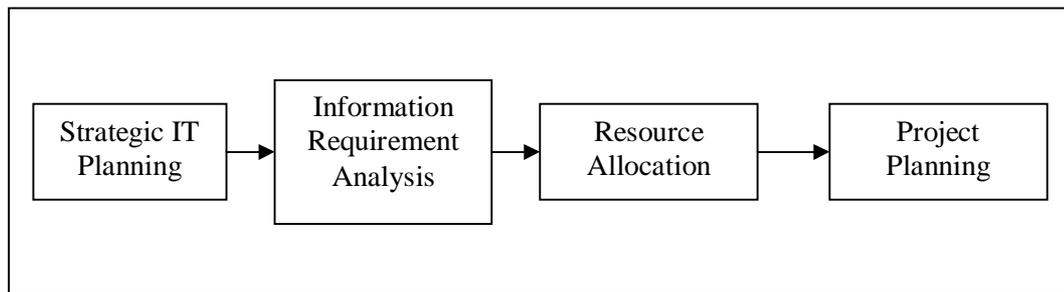
Sedangkan tahapan keluaran merupakan bagian yang dilakukan untuk menghasilkan suatu dokumen perencanaan strategis SI/TI yang isinya terdiri dari:

1. Strategi SI bisnis, yang mencakup bagaimana setiap unit/fungsi bisnis akan memanfaatkan SI/TI untuk mencapai sasaran bisnisnya, portofolio aplikasi dan gambaran arsitektur informasi.
2. Strategi TI, yang mencakup kebijakan dan strategi bagi pengelolaan teknologi dan sumber daya manusia SI/TI.
3. Strategi Manajemen SI/TI, yang mencakup elemen-elemen umum yang diterapkan melalui organisasi, untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan SI/TI yang dibutuhkan.

Beberapa teknik/metode analisis yang digunakan dalam perencanaan strategis SI/TI pada metodologi ini, mencakup analisis SWOT, analisis *Five Forces Competitive*, analisis *Value Chain*, metode *Critical Succes Factors*, metode *Balanced Scorecard*, dan *McFarlan's Strategic Grid*.

2.4.2 Metodologi Perencanaan Strategis SI/TI versi Wetherbe

Menurut Turban (Turban et al, 1999), penekanan metodologi ini lebih ke sisi teknologi dan kegiatan perencanaan strategis SI/TI-nya dibagi menjadi empat aktivitas seperti ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.3 Diagram Perencanaan Strategis SI/TI Wetherbe [Turban et al, 1999]

Penjelasan dari masing-masing aktivitas berdasarkan Gambar 2.3 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan strategis TI.

Aktivitas ini mengaitkan rencana keseluruhan organisasi dengan rencana TI, mengidentifikasi portofolio aplikasi yang membantu bisnis dan identifikasi aplikasi SI/TI yang dapat meningkatkan keunggulan bersaing.

Perencanaan strategis TI dilakukan melalui:

- a. *Business System Planning (BSP)*, yang berorientasi pada proses bisnis dan kelas data. BSP dilakukan untuk menentukan *database* perusahaan dan aplikasi yang mendukung strategi bisnis.
- b. *Strategic of IT Growth*, untuk melihat indikator pertumbuhan TI dan pengeluaran organisasi sebagai dasar menentukan peran portofolio

- aplikasi mendatang, sumber daya TI (perangkat lunak, perangkat keras, dan SDM), serta perencanaan dan kendali manajemen.
- c. *Ens/Means (E/M) Analysis*, untuk mengetahui kebutuhan informasi di tingkatan organisasi, departemen, individu, dan manajerial.
 - d. *Critical Success Factor (CSF)*
2. Analisis Kebutuhan Informasi atau *Information Requirement Analysis (IRA)*. IRA merupakan aktivitas analisis yang dilakukan untuk mencari detail kebutuhan informasi yang diperlukan oleh organisasi secara keseluruhan.
 3. Alokasi Sumber Daya SI/TI
Alokasi Sumber Daya SI/TI merupakan aktivitas perencanaan mengembangkan perangkat lunak, perangkat keras, komunikasi data, fasilitas, personil, dan aspek financial, sesuai dengan rencana utama yang telah didefinisikan dalam IRA.
 4. Perencanaan Proyek
Perencanaan proyek meliputi aktivitas pengembangan sistem sesuai dengan kerangka kerja yang direncanakan, dijadwalkan dan dikontrol.

2.4.3 Metodologi Perencanaan Strategis SI/TI versi *James Martin*

James Martin menyusun metodologi perencanaan strategis SI/TI yang berbasis *Information Engineering* (Turban et al, 1999). Dalam metodologi ini, perencanaan strategis SI/TI ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu tahap Analisis dan tahap Perancangan.

Pada tahap Analisis, terdapat beberapa proses yang dilakukan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tinjauan Model Perusahaan

Proses yang dilakukan adalah memetakan hirarki fungsi bisnis terhadap unit organisasi, lokasi, dan entitas data yang digunakan. Keluaran dari proses ini adalah dokumen yang berisi sejarah, visi, misi, struktur, tugas, dan tanggung jawab dari bagian-bagian organisasi, lokasi organisasi, analisis fungsi bisnis dan entitas data organisasi.

2. Analisis Strategi Bisnis

Proses yang dilakukan adalah menganalisis cara bersaing organisasi dalam berbisnis dan menempatkan dirinya terhadap kompetitor. Keluaran dari proses ini adalah matriks analisis: fungsi bisnis vs unit organisasi, fungsi bisnis vs subjek data, dan unit organisasi vs subjek data.

3. Analisis Sasaran dan Masalah

Proses yang dilakukan adalah memetakan gambaran terstruktur sasaran dan masalah organisasi yang ada dalam departemen/unit organisasi. Keluaran dari proses ini adalah tabel sasaran dan sub sasaran, matriks fungsi bisnis vs sasaran dan unit bisnis vs sasaran, tabel masalah, solusi dan tingkat kritisnya, fungsi bisnis vs masalah, unit organisasi vs masalah dan sasaran vs masalah.

4. Analisis CSF

Proses yang dilakukan adalah mengidentifikasi hal-hal penting bagi pengembangan bisnis dan pencapaian sasaran manajerial. Keluaran dari

proses ini berupa daftar CSF, matriks fungsi vs CSF, unit organisasi vs CSF, sasaran vs CSF dan masalah vs CSF.

5. Analisis Dampak Teknologi

Proses yang dilakukan adalah mendapatkan gambaran perubahan teknologi dan kaitannya terhadap peluang bisnis, manajemen dan ancaman dari kompetitor. Keluaran dari proses ini adalah tabel pengembangan teknologi yang akan digunakan berdasarkan waktu dan prioritas.

6. Pandangan Strategis Sistem

Proses yang dilakukan adalah mengidentifikasi kemampuan untuk melihat peluang/usaha yang tepat, sehingga melalui sistem, dapat ditentukan aplikasi, teknologi, atau manajemen guna meningkatkan posisi dan daya saing organisasi. Keluaran dari proses ini adalah tabel arahan strategis: *offensive/defensive vs differentiation/innovation/growth/alliance*.

7. Evaluasi Sistem saat ini.

Proses yang dilakukan adalah menganalisis keterhubungan antara kondisi/nilai bisnis organisasi dengan kualitas SI/TI yang ada.

Sedangkan tahap Perancangan, penjelasan mengenai proses-proses yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Arsitektur Informasi

Proses ini bertujuan menghubungkan fungsi bisnis dan subjek data berdasarkan pengelompokan fungsi bisnis dalam area bisnis. Keluaran dari proses ini berupa matriks fungsi bisnis vs subjek data, fungsi bisnis vs

subjek data yang sudah dikelompokkan, fungsi bisnis vs subjek data model dan area bisnis.

2. Pembuatan Matriks Fungsional

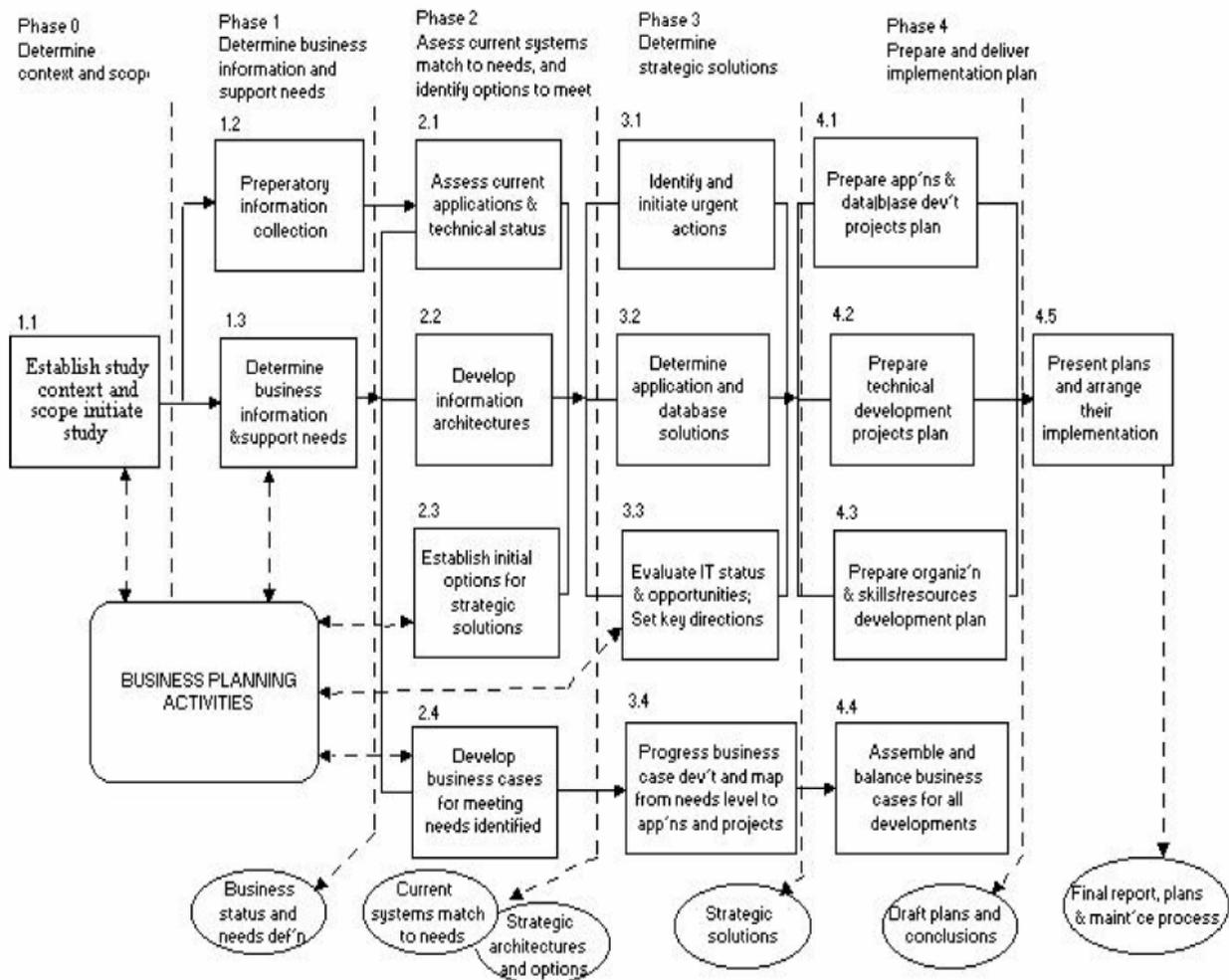
Matriks Fungsional dibuat untuk mengetahui keterhubungan antara area bisnis melalui subjek data yang tersedia. Keluarannya berupa matriks fungsi bisnis vs subjek data yang berkaitan.

3. Pembuatan jaringan komunikasi infrastruktur dan aturan yang disesuaikan dengan hasil analisis guna kepentingan implementasi saat ini dan mendatang.

4. Pembuatan ERD berdasarkan keterhubungan fungsional/entitas guna pengembangan aplikasi dan *database* sesuai dengan sasaran organisasi.

2.4.4 Metodologi Perencanaan Strategis SI/TI versi Tozer

Versi ini merupakan pendekatan yang praktis dan formal yang berdasarkan pada konsep strategi bisnis yang menentukan cara mengeksploitasi sumber daya SI/TI beserta pemanfaatannya. Gambar 2.4 menggambarkan tahapan perencanaan strategis SI/TI versi Tozer.



Gambar 2.4 Diagram Perencanaan Strategis SI/TI versi Tozer [Tozer, 1996]

Penjelasan mengenai fase-fase metodologi perencanaan strategis SI/TI versi Tozer adalah sebagai berikut:

1. Fase 0 – Menentukan Konteks dan Ruang Lingkup

Tujuan dari fase ini adalah memperoleh batasan, waktu, kontrol, penyesuaian terminologi, komitmen manajemen, dan harapan dari sistem. Keluaran yang dihasilkan pada fase ini berupa analisis konteks, batasan,

TOR (*Term of References*), identifikasi pendahuluan, tim kerja, program, dan jadwal wawancara pendahuluan.

2. Fase 1 – Menentukan Informasi Mengenai Bisnis dan Kebutuhan yang Mendukungnya.

Tujuan dari fase ini untuk mencari dasar membuat strategi, berupa rencana ke depan dalam bentuk rencana bisnis, informasi dan pendukung lainnya.

Fase ini dibagi menjadi dua kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Persiapan Pengumpulan Informasi

Tujuan kegiatan adalah mempersiapkan dasar analisis dan wawancara dengan pimpinan dengan keluarannya berupa: tujuan, arah, petunjuk, lingkungan, dan rencana bisnis; aplikasi terkini dan datanya; aset TI terkini; dan kondisi SDM.

- b. Menentukan informasi Bisnis dan Pendukungnya

Tujuan kegiatan ini adalah untuk membuat tujuan bisnis yang lengkap dan jelas, beserta arahan, lingkungan, informasi, dan pendukungnya; dan untuk memperoleh komitmen dan harapan dari manajemen senior. Keluaran dari kegiatan ini adalah: pernyataan informasi bisnis dan pendukungnya; detil kebutuhan sistem dan negosiasinya; dan sponsor bisnis yang berkomitmen pada setiap kebutuhan.

3. Fase 2 – Mengevaluasi Kesesuaian Sistem dengan Kebutuhan Bisnis saat ini dan Mengidentifikasi Pilihan Solusi.

Pada fase ini terdapat empat kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Mengevaluasi Aplikasi dan Kondisi Teknis saat ini.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh gambaran kemampuan aplikasi saat ini dalam mendukung bisnis, beserta kelemahan dan kekuatannya. Keluaran dari kegiatan ini adalah: portofolio aplikasi dan asset TI; analisis kelemahan dan kekuatannya; rencana mengatasi kelemahan; dan studi awal tentang *rapid development*, jika dibutuhkan.

b. Membangun Arsitektur Informasi

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membuat arsitektur informasi dengan keluaran mencakup: usulan struktur bisnis dan industri; usulan arsitektur SI berupa aplikasi, *database*, dan teknologi pendukungnya; Identifikasi gap antara kondisi saat ini dengan usulan yang diajukan.

c. Membuat Pilihan Awal Untuk Solusi Strategis

Tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan pilihan awal terhadap solusi aplikasi dengan keluaran berupa: identifikasi gap yang akan diatasi dengan solusi aplikasi; visi SI yang mencakup kebutuhan bisnis; pilihan solusi aplikasi; masukan bagi *rapid development*; dan kemungkinan modifikasi arsitektur SI.

d. Membangun Kasus Bisnis untuk Memenuhi Kebutuhan Bisnis

Tujuan kegiatan ini untuk mendapatkan sponsor bagi pengembangan kasus bisnis dengan keluaran berupa: sponsor yang berkomitmen; format pengembangan kasus bisnis yang memenuhi semua kebutuhan; rencana aksi untuk implementasi kasus bisnis pada solusi aplikasi.

4. Fase 3 – Menentukan Solusi Strategis

Pada fase ini terdapat empat kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Identifikasi dan Memulai Kegiatan yang Mendesak

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh kebutuhan yang jelas, tepat dan cepat dengan keluaran berupa; proposal *rapid development*; pengembangan solusi; dan keluaran yang diharapkan.

b. Menentukan solusi aplikasi dan *database*

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengkaji solusi yang telah ditawarkan, membuat prioritas dari aplikasi dan basis data yang paling sesuai dengan solusi, memperbaiki arsitektur informasi secepatnya, dan membangun teknologi yang mendukung solusi. Keluaran dari kegiatan ini adalah; pilihan dari beberapa solusi; definisi solusi yang paling tepat dengan struktur *database* yang mendukungnya; penjelasan alasan pemilihan solusi; hasil *update* arsitektur informasi; spesifikasi teknologi; dan strategi migrasi.

c. Evaluasi kondisi TI

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh kondisi TI terkini, mempelajari peluang yang ditawarkan industri TI dan penentuan arah TI mendatang. Keluaran dari kegiatan ini adalah: kondisi TI terkini, arahan dari industri; identifikasi pilihan dan identifikasi awal tentang dukungan teknis.

d. Pengembangan Kasus Bisnis

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu sponsor, memastikan agar solusi SI/TI sejalan dengan bisnis dan manfaatnya tercermin dalam implementasinya, dan memungkinkan manfaat *alternative*. Keluaran dari kegiatan ini adalah: sponsor yang berkomitmen; informasi dua arah; dan kasus bisnis

5. Fase 4 – Menyiapkan dan Melakukan Rencana Implementasi

Tujuan dari fase ini adalah untuk menyelesaikan dan melaksanakan perencanaan strategis SI/TI. Dimana terdapat beberapa kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut ini:

a. Menyiapkan Rencana Teknis Proyek Aplikasi dan *Database*

Kegiatan ini bertujuan untuk memilih solusi aplikasi dan *database*, serta membuat rencana pengembangannya, dengan keluaran berupa: pernyataan pilihan solusi aplikasi; rencana detail pengembangannya yang berhubungan dengan SDM, TI, dan kasus bisnis; dan rencana teknis proyek TI.

b. Mempersiapkan Rencana Pengembangan SDM dan Organisasi

Kegiatan ini bertujuan membuat rencana mengembangkan SDM yang sesuai dengan rencana TI. Keluaran dari kegiatan ini berupa pernyataan dan rencana detail pengembangan SDM.

c. Menyusun dan Menyeimbangkan Kasus-kasus Bisnis dengan semua Pengembangan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung pengembangan dan penyesuaian aplikasi terhadap rencana SDM dan bisnis dengan keluarannya berupa: pernyataan kasus bisnis yang sesuai dengan aplikasi, TI; dan pengembangan SDM; negosiasi dengan sponsor tentang penyelesaian dan langkah-langkah yang diterima; dan keuangan yang mendukung solusi.

d. Menampilkan Rencana dan Mengatur Implementasinya

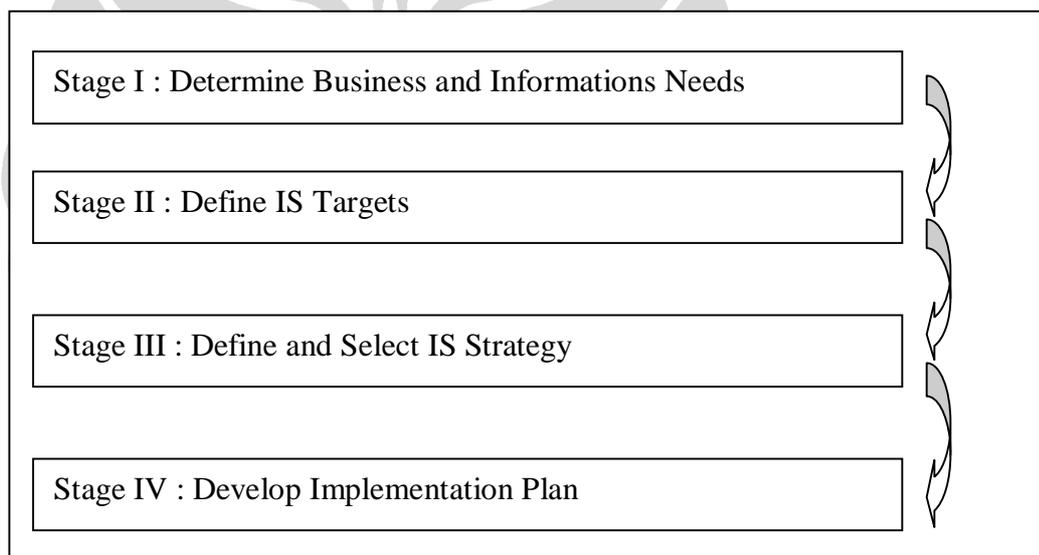
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan manajemen senior mengerti dan menerima rekomendasi solusi; mengatur implementasi; mendapatkan kesempatan untuk mengkaji, menyesuaikan rencana selama siklus perencanaan. Keluaran dari kegiatan ini adalah rencana akhir yang telah disetujui dan didukung dengan komitmen finansial; program implementasi; dan jaminan untuk dapat meninjau kembali dan menyesuaikan perencanaan strategis SI/TI jika terjadi perubahan lingkungan bisnis.

2.4.5 Price Waterhouse Planning

Metodologi Price Waterhouse (PWH) menjelaskan rincian tahapan perencanaan strategis SI yang didasarkan pada beberapa hal (PWH, 1996). Pertama, menggunakan arah dan tujuan organisasi yang dituangkan dalam *business plan*. Segala sesuatu yang menjadi *business plan* tersebut diinterpretasikan sebagai kebutuhan informasi yang harus dipenuhi. Kedua,

menggunakan *Critical Success Factor* (CSF) sebagai salah satu tolok ukur dalam membuat prioritas strategi SI/TI yang dihasilkan. Penggunaan CSF ini disebabkan karena CSF mampu merepresentasikan faktor-faktor penting dalam proses bisnis organisasi. Ketiga, menggunakan analisis *value* dan resiko yang memperhitungkan *tangible* dan *intangibile value* dalam mengungkapkan manfaat SI/TI. Keempat, memanfaatkan pengalaman praktis yang mendukung teori yang telah ada seperti *Total Cost of Ownership* (TCO) dari Gartner Group.

Metodologi *Price Waterhouse* terdiri dari empat fase. Secara ringkas, keempat fase PWH dapat dilihat pada gambar 2.5.



Gambar 2.5 Bagan Ringkasan Metodologi PWH [PWH, 1996].

Pada *stage* I, Menelaah Kebutuhan Bisnis & Informasi, akan dilakukan kegiatan untuk mendapatkan informasi yang menggambarkan keadaan bisnis dan SI/TI terkini organisasi, kebutuhan bisnis mendatang dan peluang pemanfaatan SI/TI dalam bisnis. Masukan yang diperlukan dalam *stage* ini adalah rencana bisnis, rencana SI/TI, keadaan persaingan dan perkembangan SI/TI dalam

industri. Untuk memperoleh keluaran tersebut, perlu beberapa proses yang dicerminkan ke dalam beberapa *sub-stage*, yakni:

- Pra-perencanaan Strategis;
- Identifikasi Info Organisasi;
- Analisis Lingkungan Internal Bisnis Organisasi;
- Analisis Lingkungan Internal SI/TI Organisasi;
- Analisis Lingkungan Eksternal Bisnis Organisasi;
- Analisis Lingkungan Eksternal SI/TI Organisasi;

Pada *stage II*, Menentukan target bagi SI/TI, ditentukan peluang pemanfaatan SI/TI dalam memenuhi kebutuhan strategi bisnis dan rincian detail kebutuhan SI/TI yang harus dipersiapkan. Detail kebutuhan tersebut berupa arsitektur aplikasi, infrastuktur, manajemen dan kebijakan SI/TI terhadap organisasi secara keseluruhan. Masukan yang diperlukan dalam *stage* ini adalah identifikasi kebutuhan bisnis mendatang organisasi, identifikasi peluang pemanfaatan SI/TI, dan pemenuhan kebutuhan SI/TI saat ini. Proses yang dilakukan dalam *stage* ini adalah:

- Identifikasi masalah dan solusi bisnis internal
- Identifikasi peluang bisnis dari eksternal organisasi;
- Identifikasi pemanfaatan SI/TI dari lingkungan eksternal organisasi;
- Membuat landasan kebijakan SI/TI;
- Membuat Strategi SI/TI;
- Membuat prinsip dasar/landasan bagi operasional strategi SI/TI; dan

- Membuat strategi manajemen SI/TI

Pada *stage III*, Menentukan Strategi SI/TI, dibuat prioritas, pilihan strategi, dan detail strategi SI/TI. Masukan yang diperlukan adalah strategi SI/TI dan manajemen SI/TI. Proses yang dilakukan pada *stage* ini adalah:

- Menggali *value* bisnis;
- Prioritas dan pemilihan strategi SI/TI; dan
- Pendetilan strategi SI/TI.

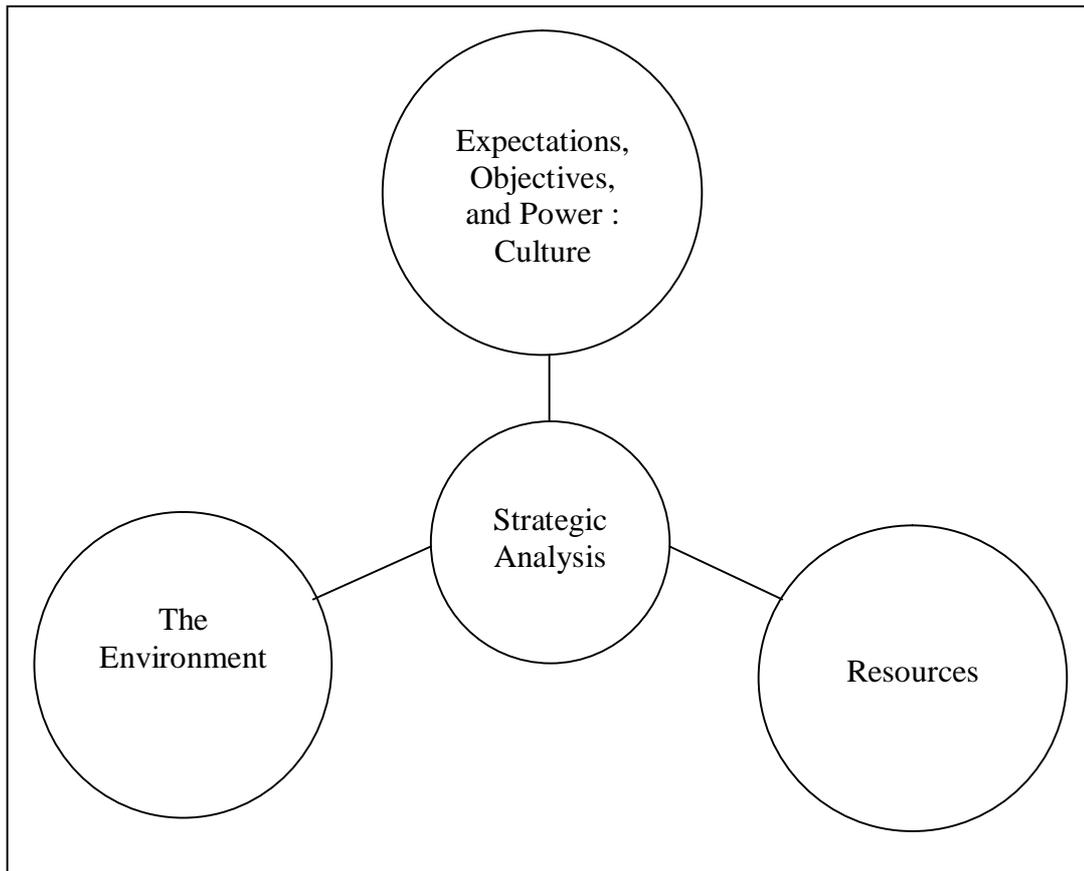
Pada *stage IV*, Rencana Implementasi, dibuat rencana dan jadwal implementasi strategi SI/TI dengan masukan dokumen detail strategi SI/TI. Untuk itu dilakukan proses:

- Membuat rencana pendukung Strategi SI/TI;
- Pembuatan jadwal waktu kerja; dan
- Pembuatan rencana pelaksanaan.

2.5 Analisis Strategis

Analisis strategis digunakan untuk memahami posisi strategis dari organisasi, memahami apa yang terjadi disekitar lingkungan organisasi dan memastikan hal tersebut berpengaruh atau tidak terhadap organisasi, memahami kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) organisasi, dan memperkirakan apa yang diinginkan oleh *stakeholder*. Analisa strategis mengarahkan untuk membentuk suatu gambaran dari lingkungan yang mempengaruhi organisasi

untuk menentukan pilihan elemen strategis dari keseluruhan proses manajemen yang strategis. Analisis strategis melibatkan pemahaman tiga faktor, yaitu : Lingkungan Organisasi (*Environment*), Kultur Organisasi (*Value and Objectives*), dan Sumber Daya (*Resources*) (Johnson and Scholes, 1993).



Gambar 2.6 Tiga Elemen Analisis Strategis [Johnson and Scholes, 1993]

2.5.1 *Environmental Analysis*

Organisasi mengidentifikasi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapinya, karena dengan hal tersebut mungkin saja dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan dan mungkin saja dapat menjadi

penghalang. Strategi organisasi haruslah langsung terarah kepada peluang lingkungan dan dapat memblok ancaman lingkungan dengan secara konsisten sesuai kemampuan internal organisasi.

Kesuksesan dari *environmental analysis* sebagian besar tergantung pada karakteristik lingkungan (*environmental characteristic*), yaitu : ”kompleksitas, berapa banyak variabel yang terdapat didalam lingkungan, rata-rata perubahan, dan jumlah (biaya) untuk ketersediaan informasi tentang semua ini”. Proses dalam melakukan *Environmental Analysis* adalah :

- a. Melakukan audit terhadap pengaruh lingkungan.
- b. Melakukan penilaian terhadap *nature of the environment* untuk menentukan kompleksitas suatu lingkungan.
- c. Identifikasi kunci kekuatan lingkungan dengan menggunakan model *Porter's Five Forces*.
- d. Identifikasi *competitive position* dengan menggunakan *life cycle analysis*.
- e. Identifikasi peluang kunci dan ancaman dengan menggunakan *SWOT analysis*.

2.5.2 Analysis of Value and Objectives

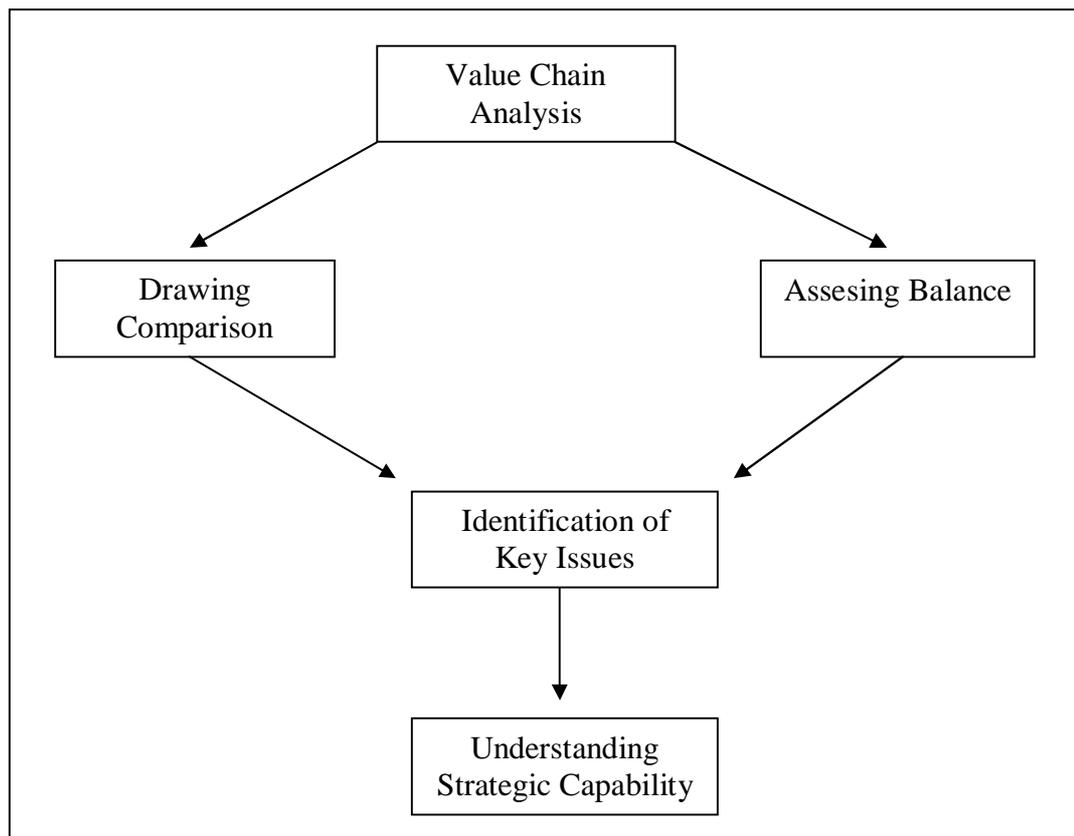
Menginterpretasikan kompleksitas jaringan kultural didalam organisasi, yaitu menginterpretasikan kultur apa yang terdapat didalam organisasi dan apa pengaruhnya terhadap organisasi. Model yang digunakan dalam analisa kultur organisasi adalah :

- a. *Strategy and Culture.*
- b. *Strategy and Objectives.*

2.5.3 Analysis of Resources

Elemen ketiga ini digunakan untuk memahami kapabilitas strategis organisasi. Tujuan proses ini adalah menetapkan apa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi, dengan kata lain apakah organisasi berjalan dengan baik ataukah mengalami kesulitan (Johnson and Scholes, 1993). Proses yang terjadi didalam analisis sumber daya adalah :

- a. *Value Chain Analysis.*
- b. *Performance Assessment.*
- c. *Product Porto Folio Analysis.*
- d. *Analysis of Core Competencies.*



Gambar 2.7 Proses Analisis Sumber Daya [Johnson and Scholes, 1993]

2.6 Metode Dan Teori Analisis Perencanaan Strategis SI/TI

2.6.1 Analisis *SWOT*

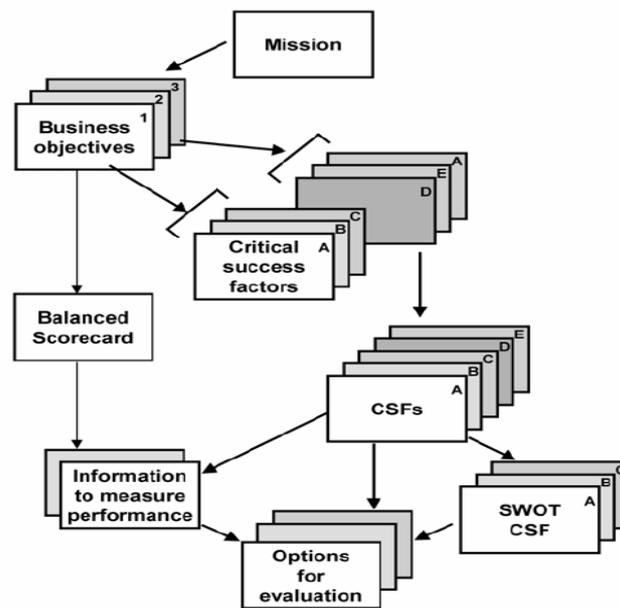
Analisis *SWOT* akan dipetakan dari hasil analisis lingkungan. Kekuatan diidentifikasi dengan tujuan untuk mengetahui apa saja kekuatan organisasi untuk dapat meneruskan dan mempertahankan bisnis. Dengan mengetahui kekuatan yang dimiliki organisasi akan dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan kekuatan sebagai modal untuk dapat bersaing. Mengidentifikasi kelemahan bertujuan untuk dapat mengetahui apa kelemahan-kelemahan yang masih ada, dan dengan mengetahui kelemahan tersebut, maka perusahaan dapat

berusaha untuk memperbaiki agar menjadi lebih baik. Kelemahan yang tidak atau terlambat teridentifikasi akan merugikan bagi perusahaan. Oleh karena itu dengan semakin cepat mengetahui kelemahan, maka perusahaan juga dapat sesegera mungkin mencari solusi untuk dapat menutupi kelemahan tersebut. Dengan mengetahui peluang, baik peluang saat ini maupun peluang dimasa yang akan datang, maka perusahaan dapat mempersiapkan diri untuk dapat mencapai peluang tersebut. Berbagai strategi dapat disiapkan lebih dini dan terencana dengan lebih baik sehingga peluang yang telah diidentifikasi dapat direalisasikan. Berbagai jalan untuk dapat mewujudkan peluang/kesempatan dan mempertahankan kelangsungan bisnis organisasi tentunya akan mengalami banyak ancaman. Ancaman yang dapat teridentifikasi dapat dicarikan jalan keluarnya sehingga organisasi dapat meminimalkan ancaman tersebut.

2.6.2 Critical Success Factor (CSF)

Analisa *CSF* merupakan suatu ketentuan dari organisasi dan lingkungannya yang berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan. *CSF* dapat ditentukan jika objektif organisasi telah diidentifikasi. Tujuan dari *CSF* adalah menginterpretasikan objektif secara lebih jelas untuk menentukan aktivitas yang harus dilakukan dan informasi apa yang dibutuhkan.

Peranan *CSF* dalam perencanaan strategis adalah sebagai penghubung antara strategi bisnis organisasi dengan strategi SI-nya, memfokuskan proses perencanaan strategis SI pada area yang strategis, memprioritaskan usulan aplikasi SI dan mengevaluasi strategi SI, seperti terlihat pada gambar 2.8



Gambar 2.8 *Critical Success Factor* [Ward and Peppard, 2002]

2.6.3 *McFarlan Strategic Grid*

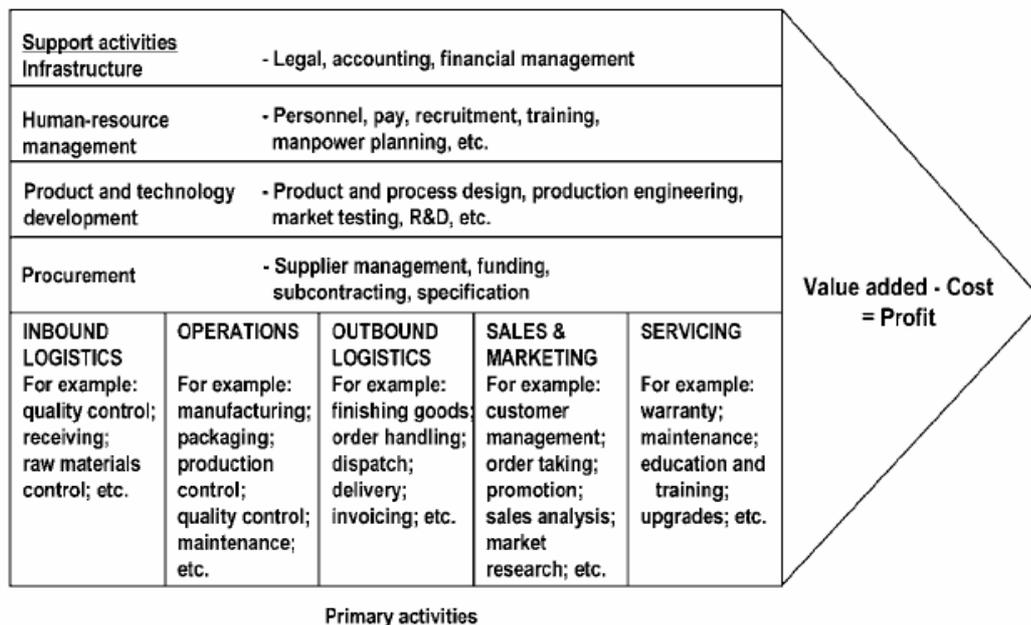
McFarlan strategic grid digunakan untuk memetakan aplikasi SI berdasarkan kontribusinya terhadap organisasi. Pemetaan dilakukan pada empat kuadran (*strategic, high potential, key operation, and support*). Dari hasil pemetaan tersebut didapat gambaran kontribusi sebuah aplikasi SI terhadap organisasi dan pengembangan dimasa mendatang (Ward and Griffith 1996), keempat kuadran tersebut dapat dilihat pada gambar 2.9

STRATEGIC	HIGH POTENTIAL
- Applications that <i>are critical to sustaining future business strategy</i>	- Applications that <i>may be important in achieving future success</i>
- Applications on which the organization <i>currently depends for success</i>	- Applications that <i>are valuable but not critical to success</i>
KEY OPERATIONAL	SUPPORT

Gambar 2.9 *McFarlan Strategic Grid [Ward and Peppard, 2002]*

2.6.4 Analisa Value Chain

Analisa *Value Chain* dilakukan untuk memetakan seluruh proses kerja yang terjadi dalam organisasi menjadi dua kategori aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Mengacu pada dokumen organisasi yang menyebutkan tugas dan fungsi setiap unit kerja berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap proses kerja yang terjadi di masing-masing unit kerja, secara diagram *value chain* dapat terlihat seperti gambar 2.10



Many activities cross the boundaries - especially, information-based activities such as: sales forecasting, capacity planning, resource scheduling, pricing, etc.

Gambar 2.10 Diagram *Value Chain* [Ward and Peppard 2002]

2.6.5 *Balanced Scorecard*

Balance Scorecard adalah alat untuk mengatur kinerja organisasi untuk pengembangan strategi organisasi itu sendiri. Dalam *balance e-Government Scorecard* Penjabaran tujuan yang baru/mendatang dilakukan menurut lima dimensi *balance e-Government Scorecard* yaitu manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi, dan manajemen perubahan (Stiftung, 2001). Hal ini dilakukan agar dapat dilakukan kontrol secara optimal dan terukur terhadap eksekusi strategi bisnis SI/TI yang akan diambil. Penjelasan dari masing-masing dimensi dapat dijelaskan seperti dibawah ini.

Dimensi pertama, manfaat. Dimensi manfaat berhubungan dengan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan dan bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dari layanan tersebut. Termasuk dalam kriteria ini adalah:

- Cakupan layanan yang sudah diimplementasikan.
- Bagaimana layanan tersebut bisa diakses dalam “*one stop shop*” dari satu portal menuju berbagai layanan.
- Kemudahan penggunaan dalam mendapatkan layanan tersebut.

Dimensi kedua, efisiensi. Efisiensi berhubungan dengan bagaimana teknologi bisa mempercepat proses dan meningkatkan kualitas layanan. Kriteria dalam efisiensi, di antaranya:

- Ketersediaan arsitektur proses, aplikasi dan *database* yang bisa berjalan baik ketika ditubuhkan.
- Perencanaan sumber daya dan keuangan secara baik
- Pemanfaatan *platform* teknologi informasi dan teknologi secara maksimal pada keseluruhan aspek.
- Kualitas dan ruang lingkup pelatihan bagi para staf dan pegawai.

Dimensi ketiga, partisipasi. Ini berhubungan dengan pertanyaan apakah layanan yang diberikan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memberikan partisipasi dalam penyampaian pendapat dan proses pengambilan keputusan. Beberapa kriteria dalam hal ini, di antaranya:

- Akses langsung masyarakat terhadap orang yang berkepentingan melalui *web*.
- Pertimbangan terhadap umpan balik dan keinginan masyarakat.
- Pengaruh dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
- Kemungkinan untuk memperdebatkan topik yang menyangkut masyarakat umum (tersedianya fasilitas *chatting*, forum, milis).

Dimensi keempat, transparansi. Apakah pemerintah dalam hal ini mendorong keterbukaan informasi menuju proses transparansi dalam pemerintahan. Kriteria transparansi, di antaranya:

- Banyaknya informasi yang dikeluarkan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan (misalnya konferensi *pers*, *release* hasil rapat kabinet, dan lain-lain).
- Informasi status permohonan aplikasi yang diajukan masyarakat. Apakah masyarakat misalnya bisa menanyakan dan mengetahui secara langsung apakah permohonan aplikasinya disetujui atau tidak.
- *Topicality of information.*

Dimensi kelima, manajemen perubahan. Ini terkait dengan proses implementasi apakah ada proses *review* yang jelas dan dikelola dengan baik. Kriteria dalam hal ini, di antaranya:

- Strategi pengembangan, misalnya seberapa besar implementasi melibatkan perbandingan dan studi kasus dengan implementasi di tempat lain.
- Kualitas kontrol dan *review*.
- Keterlibatan dan motivasi dari pegawai.

2.7 E-Government

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia *e-government* merupakan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan. Sedangkan menurut *World Bank*, *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi (seperti *Wide Area Network*, *Internet*, *Mobile Computing*) oleh lembaga

pemerintah yang mampu untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, bisnis dan lingkup lain pemerintah.

Dari beberapa pengertian seperti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Sedangkan *e-government* itu sendiri terbentuk mengadopsi dari sistem *e-business* yang telah berkembang begitu pesat, serta telah begitu banyak kajian yang dilakukan terhadap sistem tersebut.

2.7.1 Beberapa Analisa dalam Pengembangan *E-Government*

Karena *e-government* mengadopsi sistem *e-business* maka dalam pengembangan *e-government* itu sendiri tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan dalam pengembangan *e-business*, dan analisa-analisa yang dipakai dalam melakukan pengembangan *e-government* adalah sebagai berikut:

- *Strategy design*

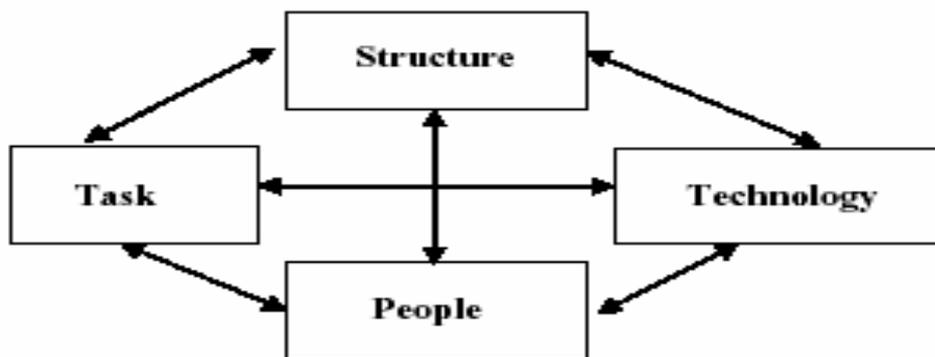
Strategy Map dari Kaplan dan Norton dapat digunakan untuk menjabarkan strategi kedalam proses-proses bisnis dan kapabilitas organisasi. Seperti terlihat pada Gambar 2.11



Gambar 2.11 *Strategy Map* dari Kaplan dan Norton [Strategy Map, 2001]

- *Process Capability*

The Leavitt Diamond menunjukkan komponen-komponen kapabilitas organisasi dalam menjalankan proses-proses bisnis strategis. Seperti terlihat pada Gambar 2.12



Gambar 2.12 *The Leavitt Diamond* [Leavitt, H. J. (1965)]

- *Analisa Critical Success Factor (CSF)*

Analisa *CSF* merupakan sebuah metode yang sangat kuat untuk mengkonsentrasikan kunci kebutuhan informasi yang diperlukan oleh sebuah organisasi.

- *Analisa SWOT*

Analisa *SWOT* dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan dan faktor-faktor positif yang berasal dari internal organisasi; kelemahan dan faktor-faktor negatif dari internal; peluang atau kesempatan dan keuntungan dari faktor eksternal dan ancaman atau resiko yang dipengaruhi oleh faktor eksternal organisasi

- Penetapan Strategi *E-Government*

Pada tahapan ini, pengembangan *e-government* telah sampai pada tahap yang sangat penting dimana setelah dilakukan analisa terhadap keadaan internal dan eksternal organisasi, maka akan ditentukan strategi *e-government* seperti apakah yang paling baik, efektif dan efisien untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

2.7.2 Beberapa Model Tahapan Pengembangan *E-Government*

Hermawan Kartajaya dkk. (2002: 330-331) menjelaskan tiga tahapan pengembangan layanan *e-government*, sebagai berikut:

- Tahap I : Menerbitkan *Informasi tentang diri sendiri* bagi kepentingan warga dan kalangan bisnis (lewat web/internet)—juga menyediakan fasilitas *komunikasi dua arah*.
- Tahap II : Aplikasi Intranet yang memungkinkan data dapat dikumpulkan (online), diolah, dan disebarluaskan dalam bentuk baru (agar lebih efisien); meskipun *sebagian proses pemberian servis tetap secara offline, publik dapat memantau kinerja secara online*.
- Tahap III : Aplikasi Extranet yang memungkinkan warga wilayah dapat mengisi blanko aplikasi secara online (lewat internet).

Menurut *World Bank* fase pengembangan *E-Government* adalah sebagai berikut:

- a. *Interact*: mempublikasikan site, yang kaya akan isi.

- b. *Interactive: e-government* meliputi dua cara komunikasi, dimulai dengan fungsi dasar seperti *e-mail* sebagai kontak informasi pemerintah atau sebagai bentuk umpan balik.
- c. *Transact*: pemerintah dapat berjalan lebih lanjut dengan membuat *website* yang membolehkan pengguna untuk transaksi *online*.

Menurut *Gartner Research* fase pengembangan *E-Government* adalah sebagai berikut:

- a. *Presence*: pada fase ini adalah mengkararakteristikan berdasarkan kesibukan penggunaan untuk memudahkan penempatan *cyberspace* pada internet.
- b. *Interaction*: pada fase ini adalah mengkararakteristikan berdasarkan Website yang menyediakan kemampuan pencarian dasar, tempat *download*, dan *link* dengan *site* yang relevan.
- c. *Transaction*: pada fase ini adalah mengkararakteristikan dengan membolehkan pemilih untuk mengarahkan dan menyelesaikan semua tugas *online*.
- d. *Transformation*: pada fase ini adalah tujuan jangka panjang dari semua inisiatif nasional dan local *e-government*.

Menurut *UN/American Service members' Protection Act (ASPA)* fase pengembangan *E-Government* adalah sebagai berikut:

- a. *Emerging*: Negara menjadi pemain *e-government*.
- b. *Enhanced*: Kehadiran Negara secara *online*, mulai untuk memperluas jumlah peningkatan website.
- c. *Interactive*: Kehadiran Negara pada internet, memperluas secara dramatis dengan akses ke jangkauan yang luas dari institusi dan pelayanan pemerintah.

- d. *Transactional*: transaksi yang lengkap dan terjamin seperti mendapatkan *visa*, *passport*, catatan kelahiran dan kematian, lisensi, surat ijin dimana pengguna dapat membayar pajak secara *online* untuk pelayanan seperti pembayaran parkir, biaya registrasi kendaraan bermotor, keperluan tagihan dan pajak.
- e. *Fully integrated or seamless*: kapasitas untuk mengakses semua pelayanan secara seketika dalam “*unified package*”.

2.7.3 Pola Arsitektur *E-Government*

Dalam pengembangan *e-government* juga memakai pola arsitektur tertentu tergantung dari negara mana yang menerapkan, yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di negaranya masing-masing, berikut ini pola arsitektur pengembangan *e-government* di Indonesia dan Amerika Serikat:

2.7.3.1 Di Indonesia

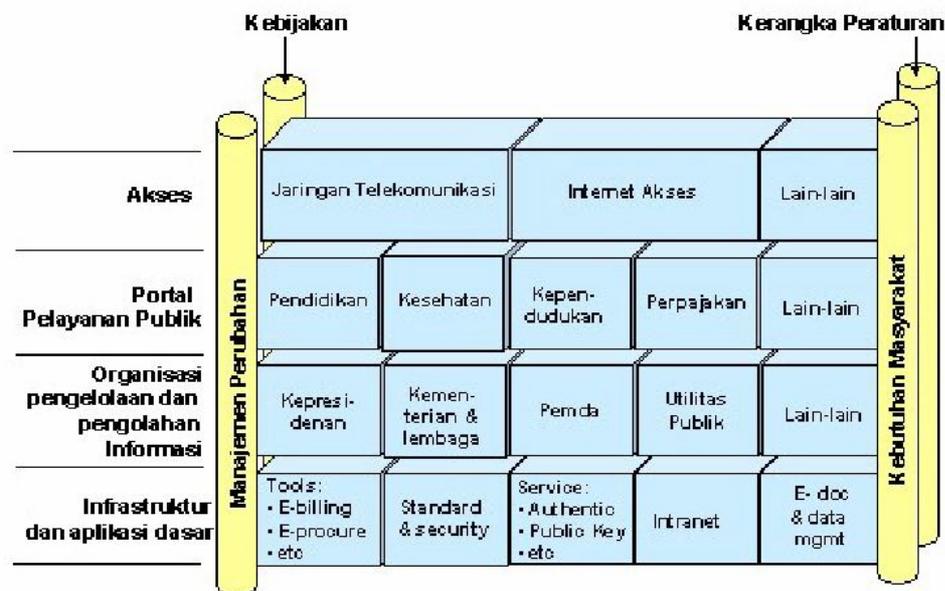
Kerangka arsitektur di Indonesia terdiri dari empat lapis struktur, yakni:

- Akses yaitu jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan publik.
- Portal Pelayanan Publik yaitu situs-situs internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.

- Organisasi Pengelolaan & Pengolahan Informasi yaitu organisasi pendukung (*back-office*) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.
- Infrastruktur dan aplikasi dasar yaitu semua prasarana baik berbentuk perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi. Baik antar *back-office*, antar Portal Pelayanan Publik dengan *back-office*, maupun antara Portal Pelayanan Publik dengan jaringan internet, secara andal, aman, dan terpercaya.

Kerangka arsitektur *e-government* tersebut dapat terlihat seperti pada

Gambar 2.13



Gambar 2.13 Arsitektur *E-Government* di Indonesia [Inpres No.3 Tahun 2003]

2.7.3.2 Di Amerika Serikat

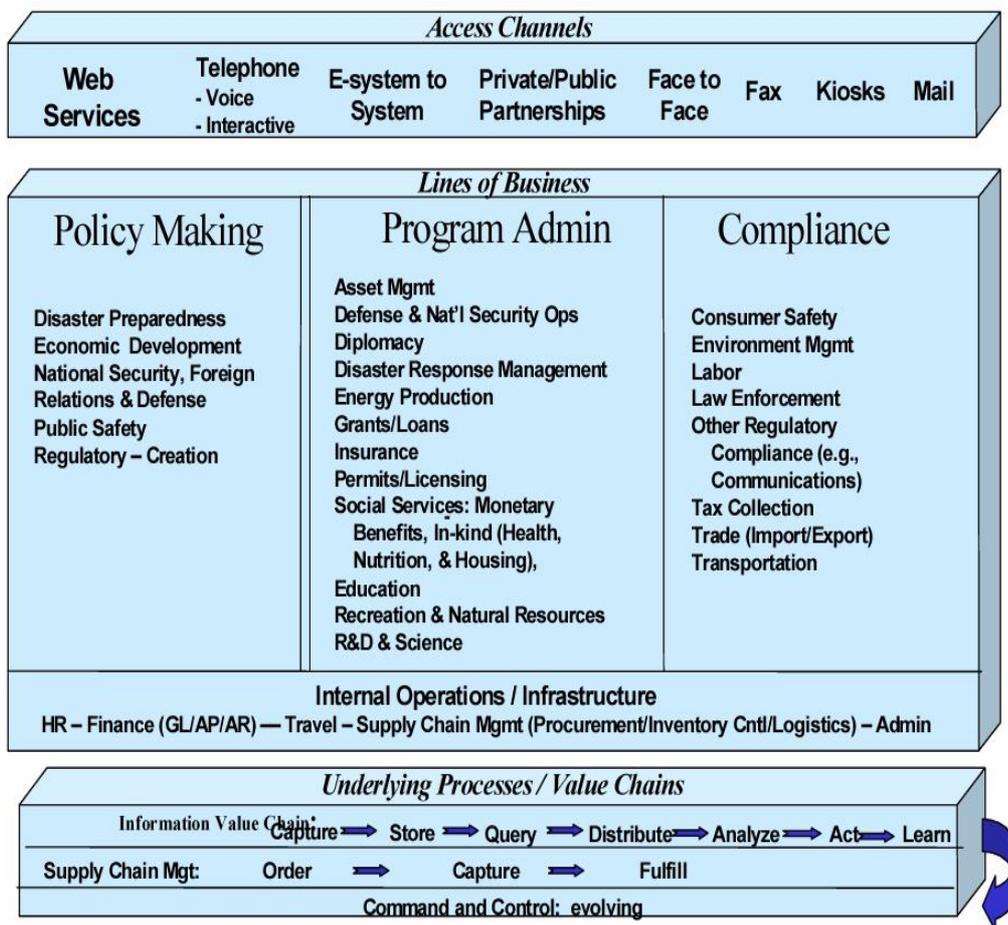
Sedangkan di Amerika, arsitektur *e-government* terbagi dalam 3 lapisan, seperti:

- Lapisan pertama adalah *Access Channel*
- Lapisan kedua adalah *Lines of Business*
- Lapisan ketiga adalah *Underlying Processes / value chains*

Kerangka arsitektur *e-government* tersebut dapat terlihat seperti pada

Gambar 2.14

An Integrated Government-wide Business Architecture



Gambar 2.14 Arsitektur *E-Government* di Amerika Serikat

[US *E-Government Strategy*]

2.7.4 Hubungan antara *E-Government* dengan Perencanaan Strategis SI/TI

Pengembangan *e-government* dilakukan dengan cara yang tidak jauh berbeda dengan perencanaan strategis SI/TI, dimana dalam pengembangan *e-*

government juga melakukan analisa CSF dan SWOT seperti yang dilakukan dalam perencanaan strategis SI/TI, walaupun ada beberapa konsep yang berbeda, karena *e-government* sendiri termasuk dalam bagian perencanaan strategis sistem informasi lembaga pemerintah, seperti yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

2.8 Tinjauan Perencanaan Strategis SI/TI dari Beberapa Organisasi Pemerintah

Dari beberapa penelitian tentang perencanaan strategis dapat kita lihat bagaimana latar belakang dan permasalahan mengapa perencanaan strategis sistem informasi perlu untuk disusun sebagai pedoman dalam pengelolaan sistem informasi saat ini dan untuk dimasa yang akan datang. Berikut adalah ringkasan dari beberapa perencanaan strategis sistem informasi:

2.8.1 Badan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Badan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 9 Tahun 2000, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 64 tahun 2001

tanggal 25 April 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Badan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas membantu Gubernur dalam menentukan kebijaksanaan di bidang Teknologi informasi sangat berperan dalam meningkatkan dan mengembangkan peran teknologi informasi khususnya Web Site Kalimantan Tengah serta menjamin data dan informasi tetap eksis dari waktu ke waktu dan bertambah banyak dari hari ke hari.

Kesatuan sistem informasi akan membentuk bank data dan informasi daerah secara *time series* dan fleksibel. Selanjutnya situs yang dikelola oleh Badan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan jendela bagi Kalimantan Tengah dari sisi pandang penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun potensi-potensi yang ada di Kalimantan Tengah baik yang berlingkup nasional maupun internasional.

2.8.1.1 Tujuan dan Ruang Lingkup Perencanaan Strategis SI/TI Badan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan dari Perencanaan Strategis Sistem Informasi bagi Badan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Daerah provinsi Kalimantan Tengah adalah diharapkan dapat menghasilkan *output* yang seoptimal mungkin, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak semata-mata hanya sebagai pengeluaran saja akan tetapi diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk investasi yang menguntungkan, serta menentukan kebijaksanaan di bidang Teknologi informasi sangat berperan dalam meningkatkan dan mengembangkan peran teknologi informasi khususnya Web Site Kalimantan Tengah serta menjamin data dan informasi tetap eksis dari waktu ke waktu dan bertambah banyak dari hari ke hari.

Ruang Lingkup dari rencana strategis SI/TI yang dilakukan oleh Badan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah, sebagai berikut :

1. Pasal 5 SK. Gubernur No. 64 tahun 2001 bahwa dalam penyelenggaraan tugas pada pasal 4 Badan Pengolahan Data dan Sistem Informasi daerah provinsi Kalimantan Tengah mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana/program dan implementasi kegiatan di bidang pengolahan data dan informasi serta pembangunan/pengembangan sistem informasi daerah.
 - b. Penyusunan, analisis, dan penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan bagi/masyarakat, pemerintah dan pihak lainnya.
 - c. Pendayagunaan sarana dan prasarana sistem informasi/perangkat multimedia baik yang bersifat tradisional, maupun berbasis komputer untuk pengelolaan/pengolahan masukan dan keluaran data, penyimpanan data dan informasi serta penyediaan data dan informasi.

- d. Pemberian bimbingan, pelayanan dan pengendalian komputerisasi dan sistem informasi kepada unit kerja di lingkungan pemerintah daerah dan kepada masyarakat luas yang memanfaatkan sistem informasi tertentu yang bersifat strategis yang dapat mempengaruhi stabilitas daerah.
 - e. Pemeliharaan, operasional dan pengamanan data dan informasi serta perangkat dan prasarana pendukungnya dalam lingkup pemerintah daerah yang terdiri dari perangkat keras, lunak, dan sumberdaya manusia.
 - f. Kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data dan informasi serta sistem informasi.
 - g. Mengusahakan pengembangan kegiatan-kegiatan pengolahan data dan informasi, pembangunan/ pengembangan sistem informasi serta pemanfaatan sarana prasarana pendukungnya untuk memungkinkan peningkatan sumber penerimaan/pendapatan daerah.
 - h. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.
2. Pasal 6 SK. Gubernur No. 64 tahun 2001 bahwa Badan Pengolahan data dan sistem informasi daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijaksanaan di bidang sistem informasi.
 - b. Penyusunan rencana dan program di bidang pembangunan dan pengembangan sistem informasi/telematika.
 - c. Pendayagunaan sarana dan prasarana sistem informasi/perangkat multimedia baik yang bersifat tradisional, maupun berbasis komputer

untuk pengelolaan/pengolahan masukan dan keluaran data, penyimpanan data dan informasi serta penyediaan data dan informasi.

- d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan telematika.
 - e. Pemeliharaan, operasional dan pengamanan data dan informasi serta perangkat dan prasarana pendukungnya dalam lingkup pemerintah daerah yang terdiri dari perangkat keras, lunak, dan sumberdaya manusia.
 - f. Pengintegrasian berbagai sistem informasi/telematika.
 - g. Pemberian bimbingan teknis di bidang pembangunan sistem informasi dan telematika.
 - h. Pelaksanaan kerjasama teknologi informasi dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi/telematika.
 - i. Pelaksanaan urusan tata usaha.
3. Pasal 7 SK. Gubernur No. 64 tahun 2001 bahwa Kepala Badan Pegolahan Data dan Sistem Informasi Daerah bertugas membina, mengkoordinasikan, merencanakan, mengendalikan, menyusun kebijaksanaan serta mengembangkan semua kegiatan pengolahan data dan sistem informasi.
4. Pasal 8 SK. Gubernur No. 64 tahun 2001 bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut di pasal 7 Kepala Badan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana program kerja dan mengimplementasikan kegiatan di bidang pengolahan data dan informasi daerah.
 - b. Penyusunan, menganalisis serta menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan bagi Pemerintah Daerah dan Pihak lain.

- c. Pemberdayaan sarana dan prasarana sistem informasi/perangkat multimedia baik yang bersifat tradisional maupun komputer guna penyediaan data dan informasi.
- d. Pemberian bimbingan, pelayanan dan pengendalian komputerisasi dan sistem informasi kepada unit/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat luas yang memanfaatkan sistem informasi tertentu yang bersifat strategis yang dapat mempengaruhi stabilitas Daerah.
- e. Pelaksanaan kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data dan informasi serta sistem informasi.
- f. Pengusahaan pembangunan/pengembangan sistem informasi serta pemanfaatan sarana prasarana pendukungnya untuk memungkinkan peningkatan sumber penerimaan/pendapatan daerah.
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2.8.1.2 Proses Pembuatan Perencanaan Strategis Sistem Informasi Badan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Proses pembuatan Perencanaan Strategis Sistem Informasi adalah dengan menyelaraskan misi lembaga, program, dan kebutuhan bisnis, arsitektur dengan standar pemerintah pusat yang tertuang dalam Dasar Hukum Pembentukan RI-SIMDA(Sistem Informasi Manajemen Daerah).

2.8.1.3 Struktur Dokumen Perencanaan Strategis Sistem Informasi Badan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Dokumen perencanaan strategis sistem informasi Badan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dibagi menjadi beberapa bagian, yang terdiri dari :

- Analisa Kondisi Saat Ini
- Analisa SWOT
- Visi
- Misi
- Tujuan
- Strategi dan Kebijakan
- Matriks Program dan Kegiatan

2.8.1.4 Kesimpulan

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan sebagai suatu pedoman, dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja, memerlukan komitmen dan dukungan semua personil di lingkungan Badan Pengolahahan Data dan Sistem Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2.8.2 Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Nusa Tenggara Timur

Rencana Strategis Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Nusa Tenggara Timur disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan Konstituante, sedangkan landasan operasionalnya berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Propinsi Nusa Tenggara Timur.

2.8.2.1 Tujuan dan Ruang Lingkup Perencanaan Strategis SI/TI Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Nusa Tenggara Timur

Tujuan dari pembuatan Perencanaan Strategis Sistem Informasi ini adalah memberikan arah pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah untuk mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan Ruang Lingkup dari Perencanaan Strategis Sistem Informasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah mencakup penyediaan data dan informasi yang cepat, tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta murah yang berbasis teknologi atau komputer untuk pengambilan keputusan para pengguna.

2.8.2.2 Proses Pembuatan Perencanaan Strategis Sistem Informasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Nusa Tenggara Timur

Pembuatan Perencanaan Strategis Sistem Informasi merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun sampai dengan 5 (Lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran sampai dengan Tahun 2008.

Komponen Perencanaan Strategis yang tetap dipertahankan dan mengacu pada Pola dasar dan Program Pembangunan Daerah adalah visi, misi dan strategi utama, serta yang menjadi perhatian kelembagaan Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun mendatang.

2.8.2.3 Struktur Dokumen Perencanaan Strategis Sistem Informasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Nusa Tenggara Timur

Sistematika Rencana Strategis Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari :

- A. Pengertian
- B. Ruang Lingkup
- C. Kedudukan
- D. Maksud dan Tujuan
- E. Landasan
- F. Tugas Pokok dan Fungsi

Bab II Visi, Misi dan Nilai

- A. Visi
- B. Misi

C. Nilai

Bab III Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

A. Analisis Lingkungan Internal

- Kekuatan
- Kelemahan

B. Analisis Lingkungan Eksternal

- Peluang
- Ancaman

Bab IV Kajian dan Analisis Faktor Internal dan Eksternal Strategis

A. Kajian dan Analisis Faktor Internal Strategis

B. Kajian dan Analisis Faktor Eksternal Strategis

C. Analisis SWOT

D. Asumsi-asumsi Strategik

Bab V Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Bab VI Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan
2. Sasaran

Bab VII Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

- A. Kebijakan
- B. Program
- C. Kegiatan

Bab VIII Penutup

2.8.2.4 Kesimpulan

Perencanaan Strategis Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai Kerangka Strategis Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan tetap memperhatikan visi dan misi Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

2.8.3 Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Jogja *Cyber Province* yang merupakan bentuk implementasi *Electronic Government (e-Government)* adalah inisiatif yang dikembangkan guna mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan interaksi satu dengan yang lainnya.

Jogja *Cyber Province Blueprint* dengan titik berat pada *Digital Government Services (DGS)*. Pengembangan DGS adalah langkah awal untuk menuju *Jogja Cyber Province* sebagai inisiatif yang dikembangkan guna mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan Pemerintah dalam rangka meningkatkan interaksi satu dengan yang lainnya, sehingga diharapkan dapat mengakselerasi upaya peningkatan taraf hidup dan daya saing dalam rangka mewujudkan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan Jawa bagian Selatan maupun *Economic Hub* bagi propinsi lainnya di Indonesia.

2.8.3.1 Tujuan dan Ruang Lingkup Perencanaan Strategis SI/TI Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang *Jogja Cyber Province* Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah untuk memberikan arahan strategis kepada jajaran pengambil keputusan di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kaitannya dengan penyelenggaraan layanan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta berbagai konsekuensinya.

Ruang Lingkup Strategi pembangunan DIY jangka menengah meliputi empat butir, yaitu: (1) menanggulangi pengangguran dan kemiskinan dengan menciptakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakartagan kerja dan usaha bagi masyarakat miskin, (2) menyiapkan perangkat lunak dan perangkat keras serta aparatur pemerintah dalam rangka pelaksanaan otonomi 12 daerah, (3) menjamin kehandalan ketahanan pangan yang merata kepada segenap masyarakat di wilayah DIY, dan (4) mengantisipasi dan menanggulangi dampak bencana, baik bersifat fisik maupun nonfisik yg terencana dgn baik.

2.8.3.2 Proses Pembuatan Perencanaan Strategis Sistem Informasi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Makna pokok *Jogja Cyber Province Blueprint* yang dititikberatkan pada *Digital Government Services* adalah:

1. Cetak Biru (*Blueprint*) adalah panduan pengembangan layanan strategis yang mencakup aspek sumberdaya manusia dan organisasi (*people*), proses, dan teknologi.
2. Transformasi Layanan adalah kunci sukses pengembangan layanan dengan melakukan transformasi bertahap terhadap kecakapan sumberdaya manusia dan organisasi, perbaikan proses kerja, dan penerapan teknologi yang sesuai.
3. Layanan Strategis adalah layanan unggulan yang menjadi pembeda (*differentiator*) dengan daerah lain di Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing. Layanan Strategis juga berfungsi sebagai pemercepat (*accelerator*) pencapaian tujuan.
4. Berorientasi masyarakat (*citizen centric*): adalah memberikan layanan bagi masyarakat dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan daya saing dan taraf hidup masyarakat.
5. Berbasis informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

2.8.3.3 Struktur Dokumen Perencanaan Strategis Sistem Informasi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Mengacu pada tingkatan pengembangan *e-government* menurut Hermawan Kertajaya dkk. (2002), karena perekonomian DIY tidak dapat bertumpu dari sumber daya alam, tapi lebih mendasarkan pada keunggulan sumberdaya manusianya, maka pengembangan *e-government* DIY perlu mengikuti jejak Singapura. Dalam hal ini, pembangunan *e-government* DIY sebaiknya menuruti tahapan sebagai berikut:

- Tahap pertama, *e-government* dikembangkan sebagai *internally-networked public-service provider* (kuadran I)
- Tahap kedua, *e-government* dikembangkan menjadi *externally-networked public-service provider* (kuadran II)
- Tahap ketiga meloncat ke *externally-networked economic development oriented* (kuadran IV).

2.8.3.4 Kesimpulan

Jogja Cyber Province adalah model propinsi yang melakukan transformasi layanan yang berorientasi pelanggan (masyarakat) dengan berbasis pada proses bisnis, informasi, dan pengetahuan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akselerator pembangunan wilayah propinsi yang berdaya saing, nyaman, mandiri, efisien, dan efektif.

2.8.4 Washington State

Pada April 2002 *Washington State Departement of Information Service* (DIS) mempublikasikan *Information Technology Portfolio Management Standars* sebagai pedoman operasional dan perencanaan system teknologi informasi. Pada juli 2005, *Washington State Public Disclosure Commision*, menyusun portfolio teknologi informasi dan direvisi pada bulan Agustus 2005 (WS-PDC, 2005).

Dokumen ini berisi ringkasan strategi bisnis dan strategi teknologi informasi yang sesuai, prasarana teknologi saat ini, proyek terkini yang direncanakan, serta investasi potensial yang dipertimbangkan. Informasi ini mengenai investasi teknologi informasi dari *Public Disclosure Commision*, baik

sekarang maupun sudah direncanakan, diperlukan bagi keefektifan pimpinan puncak untuk mengambil keputusan dan *oversight* dari teknologi yang ada didalam komisi tersebut.

2.8.4.1 Tujuan dan Ruang Lingkup Perencanaan Strategis SI/TI *Washington State*

State

Tujuan dari dokumen portofolio Teknologi Informasi *Washington State* yang sudah memenuhi syarat dari *Washington State Information Service Board* (ISB) adalah untuk memberikan informasi operasi dan perencanaan sistem Teknologi Informasi.

Ruang lingkup dari Perencanaan Strategis Teknologi Informasi mencakup 4 (empat) divisi, yaitu : *Administration Division, Compliance Division, Information Technology Division, dan Filer Assistance Division.*

2.8.4.2 Proses Pembuatan Perencanaan Strategis TI *Washington State*

Proses pembuatan dokumen Perencanaan Strategis Teknologi Informasi *Washington State* dibuat selama proses pengembangan anggaran dua kali setahun. Perencanaan ini dimasukkan ke dalam perhitungan siklus pengganti, perangkat baru, dan kebutuhan perangkat lunak, penambahan staf dan biaya kontrak pemeliharaan. Perencanaan ini kemudian diperiksa oleh *Executive Management Team* sebagai bagian dari agen anggaran. Tim manajemen mendapat masukan prioritas dan komisi melalui Proses Perencanaan Strategis.

2.8.4.3 Struktur Dokumen Perencanaan Strategis TI Washington State

Struktur dari dokumen perencanaan strategis TI terdiri dari *Section I, II, III, IV, V, VI, dan Appendices, Section I – IT Portfolio Overview*, terdiri dari tujuan, *convergence* misi bisnis dan strategi TI. *Section II – Strategic Plan*, menjelaskan Strategi penerapan teknologi yang didukung oleh perencanaan strategis tersebut. *Section III – Agency Technology Infrastructure*, menjelaskan infrastruktur yang dimiliki saat ini dan yang direncanakan ke depan. *Section IV- Technology Investments/Project Summaries*, menjelaskan investasi yang dibutuhkan dan akan diproyekkan di setiap divisi dalam organisasi. *Section V – Planned Investments/Projects*, menjelaskan proyek yang direncanakan akan diimplementasikan. *Section VI – Annual technology Investment and Project review*, menjelaskan bahwa semua investasi dan proyek yang telah dilakukan akan di *review* setiap tahun. *Appendix A* melampirkan *Security Verification Letter*. Dan *Appendix A* melampirkan *Security Verification Letter*. Dan *Appendix B* memuat Diagram jaringan *Public Disclosure Commision*.

2.8.4.4 Kesimpulan

Sebagai pedoman yang bersifat khusus dalam Perencanaan Strategis Teknologi Informasi dari Washington State tersebut, dokumen ini mengatur secara rinci rencana proyek yang diimplementasikan di setiap divisi serta

dilengkapi dengan estimasi anggaran dari setiap proyek. Semua perencanaan didokumentasikan secara rinci serta ditentukan proyek (baik *software* maupun *hardware*) yang tepat untuk seluruh departemen yang ada di Washington State, agar selaras dengan Visi dan Strategi bisnis yang ada.

2.8.5 New York State

Pada 20 Juni 2006 *New York State of The Chief Information Officer* mempublikasikan *New York State Information Technology Strategic Plan*. Dokumen tersebut merupakan *blueprint* yang menggambarkan kemajuan dan arahan masa depan dari kebanyakan prakarsa teknologi informasi. Perencanaan ini memaksa proposisi nilai dalam menampilkan sumber daya teknologi informasi melalui suatu prisma enterprise.

New York State Information Technology Strategic Plan merupakan representatif dari pemikiran dan masukan lebih 80 organisasi anggota dari *New York State of The CIO*, dimana keseluruhan pemikiran dan masukan tersebut merupakan pengalaman dari kegiatan teknologi informasi masing-masing anggota.

2.8.5.1 Tujuan dan Ruang Lingkup Perencanaan Strategis SI/TI *New York State*

Tujuan dari Perencanaan Strategis SI/TI *New York State* adalah Investasi SI/TI yang optimal didalam organisasi, Pemilihan arsitektur organisasi yang

sesuai dengan kondisi *New York State*, pemerintahan yang terintegrasi, dan manajemen gugus kerja yang efektif dan efisien.

Ruang lingkup dari Perencanaan SI/TI *New York State* adalah konsolidasi data center dan server, Manajemen dalam hal akses dan identitas, Sistem manajemen keuangan yang terintegrasi, Telepon IP (*Internet Protocol*) dan VoIP (*Voice over TCP/IP*), dan Jaringan tanpa kabel (*wireless*) didalam penyelenggaraan jaringan komputer didalam *New York State*.

2.8.5.2 Proses Pembuatan Perencanaan Strategis TI *New York State*

Proses pembuatan dokumen Perencanaan Strategis Teknologi Informasi *New York State* dibuat berdasarkan *NYS Executive Order No. 117*, yang dipublikasikan 28 Januari 2002. Dimana merupakan pemikiran dan masukan lebih 80 organisasi anggota dari *New York State of The CIO*, berdasarkan pengalaman dari kegiatan teknologi informasi masing-masing anggota.

2.8.5.3 Struktur Dokumen Perencanaan Strategis TI *New York State*

Struktur dari dokumen perencanaan strategis TI terdiri dari *Section I, II, III, IV, V, VI* dan *Appendices*, *Section I – Vision*, terdiri dari Visi strategi TI. *Section II – Mission*, terdiri dari misi dari strategi IT. *Section III – IT Goals*, menjelaskan Tujuan IT yang ingin dicapai. *Section IV – Strategic Plan*, menjelaskan Strategi penerapan teknologi yang didukung oleh perencanaan strategis tersebut. *Section V- Tecnology Investments/Project Summaries*, menjelaskan investasi yang dibutuhkan dan akan diproyekkan di setiap divisi

dalam organisasi. *Section VI – Planned Investments/Projects*, menjelaskan proyek yang direncanakan akan diimplementasikan. *Appendix A* melampirkan *Overview of the Strategic Planning Process*. *Appendix B* memuat *Updates to the Strategic Plan*. *Appendix C* melampirkan *Contributors*, dan *Appendix D* melampirkan *Glossary of Terms*.

2.8.5.4 Kesimpulan

Negara bagian *New York* secara sungguh-sungguh memanfaatkan teknologi untuk mempertahankan posisi kepemimpinan dalam layanan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Dibutuhkan banyak pengorbanan, kepercayaan diri, partisipasi, dan kolaborasi untuk mencapai visi TI yang telah ditetapkan oleh pemerintah Negara bagian *New York*.

2.9 Perbandingan Antar Dokumen Perencanaan Strategis SI/TI

Berdasarkan tinjauan literatur terhadap lima dokumen perencanaan strategis SI/TI dilingkungan organisasi pemerintahan, dimana 3 dokumen dari organisasi pemerintah dan dua dokumen dari pemerintah USA, maka pada tabel dibawah ini ditunjukkan perbandingan diantaranya, menurut cakupan aspek yang dibahas dalam masing-masing dokumen perencanaan strategis.

Tabel 2.1 Perbandingan beberapa dokumen perencanaan strategis SI/TI

No	Aspek yang dibahas	Dokumen Perencanaan Strategis SI/TI/MI				
		Badan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Nusa Tenggara Timur	Pemerintah Provinsi DIY	Washington State	New York State
1	Deskripsi Proses Perencanaan Strategis	✓	✓	✓	✓	✓
	- Analisa SWOT	✓	✓	✓	✓	✓
	- Analisa Value Chain			✓		
2	Visi/Misi/SI/TI	✓	✓	✓	✓	✓
3	Tujuan/Sasaran	✓	✓	✓	✓	✓
4	Strategi SI	✓	✓	✓	✓	✓
5	Strategi TI	✓	✓	✓	✓	✓
6	Pemetaan Strategi SI/TI dengan Strategi Organisasi	✓	✓	✓	✓	✓
7	Manajemen/Organisasi SI/TI	✓	✓	✓	✓	✓
8	Aspek Pengamanan			✓	✓	✓
9	Aspek Anggaran			✓	✓	✓
10	Model/Portofolio/Arsitektur Aplikasi SI	✓	✓	✓	✓	✓
11	Model/Arsitektur/Desain Infrastruktur TI	✓	✓	✓	✓	✓
12	Analisis Data/Informasi	✓	✓	✓	✓	✓
13	Dokumen perencanaan strategis SI/TI berhubungan dengan dokumen perencanaan strategis SI/TI yang lain	✓	✓	✓	✓	✓

Dari Perbandingan perencanaan strategis sistem informasi diatas dapat dilihat hal-hal yang jika dianalisis lebih lanjut, dapat membentuk suatu kerangka umum dalam proses penyusunan maupun cakupan perencanaan strategis SI/TI untuk lingkungan pemerintah daerah.

Analisa hal-hal penting dari perbandingan dokumen perencanaan strategis SI/TI adalah sebagai berikut:

1. Proses penyusunan perencanaan strategis SI/TI

Semua dokumen perencanaan strategis SI/TI yang dijadikan literatur perbandingan, mendeskripsikan proses penyusunan dokumen perencanaan strategis SI/TI. Disini kita dapat melihat hal-hal apa saja yang menjadi masukan pada penyusunan dokumen perencanaan strategis SI/TI serta bagaimana prosesnya berjalan. Masukan proses perencanaan strategis SI/TI adalah berbagai hal yang berhubungan langsung dengan perencanaan strategis SI/TI seperti peraturan pemerintah, kebijakan organisasi, serta visi dan misi dari organisasi yang bersangkutan.

Proses perencanaan strategis SI/TI dilakukan dengan melihat peraturan yang berlaku umum yang berkaitan dengan SI/TI dan dengan melihat dokumen-dokumen tentang gambaran bisnis organisasi, serta harapan organisasi dimasa depan. Dari dokumen atau sumber-sumber masukan yang ada, maka dilakukan analisis, untuk mengetahui kondisi organisasi saat ini dan untuk mendapatkan harapan-harapan dimasa depan.

2. Pernyataan visi dan misi SI/TI

Kesemua dokumen perencanaan strategis SI/TI yang dijadikan literatur pada penelitian ini, menjelaskan tentang strategi SI/TI yang harus dilakukan guna mencapai visi dan misi SI/TI yang telah ditetapkan.

3. Aspek pengamanan SI/TI

Semua dokumen perencanaan strategis SI/TI yang diperbandingkan, kecuali Badan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan KPDE Provinsi Nusa Tenggara Timur, memasukkan bagian yang membahas tentang pengamanan SI/TI. Dimana faktor pengamanan merupakan hal penting dalam penyusunan perencanaan strategis SI/TI.

4. Portfolio/arsitektur SI/TI

Seluruh dokumen perencanaan strategis SI/TI yang dijadikan literatur perbandingan, menjelaskan gambaran umum portfolio/arsitektur SI/TI dari organisasi. Dimana hal tersebut mendefinisikan kebutuhan akan aplikasi SI/TI yang mendukung organisasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditentukan.

5. Keterhubungan dokumen perencanaan strategis SI/TI dengan dokumen perencanaan strategis yang lain

Perencanaan strategis SI/TI yang dibuat harus mampu berkomunikasi dan membagi informasi (secara aman, untuk beberapa kasus) baik dengan internal organisasi maupun eksternal organisasi.

2.10 Kerangka Umum Perencanaan Strategis SI/TI

Melihat hasil dari analisis beberapa dokumen perencanaan strategis SI/TI, dapat diambil kerangka umum perencanaan strategis SI/TI, untuk menyusun perencanaan strategis SI/TI organisasi pemerintah. Kerangka umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masukan proses perencanaan strategis SI/TI

Yang menjadi bahan masukan bagi proses perencanaan strategis SI/TI adalah berbagai hal yang menjadi pengaruh bagi perencanaan strategis SI/TI seperti dokumen perencanaan strategis organisasi, peraturan pemerintah (baik yang berhubungan dengan SI/TI ataupun yang tidak berhubungan), serta visi dan misi organisasi.

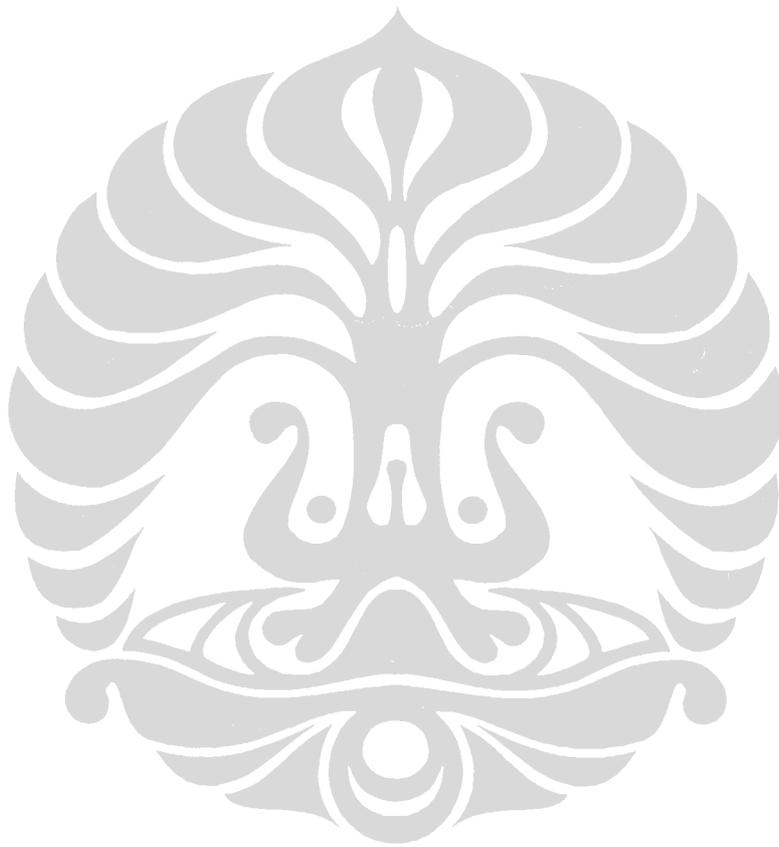
2. Proses penyusunan perencanaan strategis SI/TI

Proses penyusunan perencanaan strategis SI/TI secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Menginisialisasi proses strategi, merupakan tahap awal dimana tujuan, objektif, ruang lingkup dan hal-hal yang nantinya akan didapat.
- b. Memahami situasi sekarang dan menginterpretasikan kebutuhan bisnis mendatang dengan menganalisa strategi bisnis, objektif, *critical success factor* untuk menentukan situasi sekarang, kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancamannya, dan informasi yang dibutuhkan sehingga fokus pada sistem aplikasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.
- c. Menentukan strategi SI/TI bisnis yang meliputi sistem informasi secara konseptual yang digabungkan dan dipetakan menjadi *portofolio*

aplikasi yang menggambarkan situasi saat ini, *portfolio* aplikasi yang dibutuhkan dan *portfolio* aplikasi potensial yang akan datang.

Dalam penelitian ini, kerangka umum perencanaan strategis SI/TI lembaga pemerintah non departemen yang didapat akan dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan strategis SI/TI bagi organisasi pemerintah yang dijadikan sebagai contoh kasus dalam penelitian ini.



BAB III
PROFIL ORGANISASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

3.1 Sejarah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

Sejarah Purwakarta berdasarkan kronologis sejarah terbagi atas tata pemerintahan daerah pada masa sebelum penjajahan Belanda, tata pemerintahan daerah pada masa penjajahan Belanda, dan tata pemerintahan daerah pasca kemerdekaan Indonesia.

3.1.1 Tata Pemerintahan Daerah pada Masa Sebelum Penjajahan

Tata pemerintahan daerah Purwakarta pada masa sebelum penjajahan Belanda tidak terlepas dari sejarah perjuangan melawan pasukan *VOC*. Sekitar awal abad ke-17 Sultan Mataram mengirimkan pasukan tentara yang dipimpin oleh Bupati Surabaya ke Jawa Barat. Salah satu tujuannya adalah untuk menundukkan Sultan Banten. Tetapi dalam perjalanannya bentrok dengan pasukan *VOC* sehingga terpaksa mengundurkan diri.

Setelah itu dikirimkan kembali ekspedisi kedua dari Pasukan Mataram di bawah pimpinan Dipati Ukur serta mengalami nasib yang sama pula. Untuk menghambat perluasan wilayah kekuasaan kompeni (*VOC*), Sultan Mataram mengutus Penembahan Galuh (Ciamis) bernama R.A.A. Wirasuta yang bergelar Adipati Panatayuda atau Adipati Kertabumi III untuk menduduki Rangkas Sumedang (Sebelah Timur Citarum). Selain itu juga mendirikan benteng pertahanan di Tanjungpura, Adiarsa, Parakansapi dan Kuta Tandingan.

Setelah mendirikan benteng tersebut Adipati Kertabumi III kemudian kembali ke Galuh dan wafat. Nama Rangkas Sumedang itu sendiri berubah menjadi Karawang karena kondisi daerahnya berawa-rawa (Sunda: "Karawaan"). Sultan Agung Mataram kemudian mengangkat putera Adipati Kertabumi III, yakni Adipati Kertabumi IV menjadi Dalem (Bupati) di Karawang, pada Tahun 1656. Adipati Kertabumi IV ini juga dikenal sebagai Panembahan Singaperbangsa atau Eyang Manggung, dengan ibu kota di Udug-udug.

Pada masa pemerintahan R. Anom Wirasuta putera Panembahan Singaperbangsa yang bergelar R.A.A. Panatayuda I antara Tahun 1679 dan 1721 ibu kota Karawang dari Udug-udug pindah ke Karawang, dengan daerah kekuasaan meliputi wilayah antara Cihoe (Cibarusah) dan Cipunagara. Pemerintahan Kabupaten Karawang berakhir sekitar tahun 1811-1816 sebagai akibat dari peralihan penguasaan Hindia-Belanda dari Pemerintahan Belanda kepada Pemerintahan Inggris.

3.1.2 Tata Pemerintahan Daerah pada Masa Penjajahan Belanda

Antara tahun 1819-1826 Pemerintahan Belanda melepaskan diri dari Pemerintahan Inggris yang ditandai dengan upaya pengembalian kewenangan dari para Bupati kepada Gubernur Jendral Van der Capellen. Dengan demikian Kabupaten Karawang dihidupkan kembali sekitar tahun 1820, meliputi wilayah tanah yang terletak di sebelah Timur kali Citarum/Cibeet dan sebelah Barat kali Cipunagara. Dalam hal ini kecuali Onder Distrik Gandasoli, sekarang Kecamatan Plered pada waktu itu termasuk Kabupaten Bandung. Sebagai Bupati I Kabupaten

Karawang yang dihidupkan kembali diangkat R.A.A. Surianata dari Bogor dengan gelar Dalem Santri yang kemudian memilih ibu kota Kabupaten di Wanayasa.

Pada masa pemerintahan Bupati R.A. Suriawinata atau Dalem Sholawat, pada tahun 1830 ibu kota dipindahkan dari Wanayasa ke Sindangkasih, yang kemudian diberi nama "PURWAKARTA" yang artinya Purwa: permulaan, karta: ramai/hidup. Diresmikan berdasarkan besluit (surat keputusan) pemerintah kolonial tanggal 20 Juli 1831 nomor 2.

Pembangunan dimulai antara lain dengan pengurugan rawa-rawa untuk pembuatan Situ Buleud, Pembuatan Gedung Keresidenan, Pendopo, Mesjid Agung, Tangsi Tentara di Ceplak, termasuk membuat Solokan Gede, Sawah Lega dan Situ Kamojing. Pembangunan terus berlanjut sampai pemerintahan Bupati berikutnya.

3.1.3 Tata Pemerintahan Daerah Pasca Kemerdekaan

Kabupaten Karawang dengan ibu kotanya di Purwakarta berjalan sampai dengan tahun 1949. Pada tanggal 29 Januari 1949 dengan Surat Keputusan Wali Negeri Pasundan Nomor 12, Kabupaten Karawang dipecah dua yakni Karawang Bagian Timur menjadi Kabupaten Purwakarta dengan ibu kota di Subang dan Karawang Bagian Barat menjadi Kabupaten Karawang. Berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 1950, tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, selanjutnya diatur penetapan Kabupaten Purwakarta, dengan ibu kota Purwakarta, yang meliputi Kewedanaan Subang, Sagalaherang, Pamanukan, Ciasem dan Purwakarta.

Pada tahun 1968, berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang SK Wali Negeri Pasundan dirubah dan ditetapkan Pembentukan Kabupaten Purwakarta dengan Wilayah Kewedanaan Purwakarta di tambah dengan masing-masing dua desa dari Kabupaten Karawang dan Cianjur. Sehingga pada tahun 1968 Kabuapten Purwakarta hanya memiliki 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Purwakarta, Plered, Wanayasa dan Campaka dengan jumlah desa sebanyak 70 desa. Untuk selanjutnya dilaksanakan penataan wilayah desa, kelurahan, pembentukan kemantren dan peningkatan status kemantren menjadi kecamatan yang mandiri. Maka saat itu Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah: 183 desa, 9 kelurahan, 8 kamantren dan 11 kecamatan.

Berdasarkan perkembangan Kabupaten Purwakarta, pada tahun 1989 telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.26-672 tanggal 29 Agustus 1989 tentang lahirnya lembaga baru yang bernama Wilayah Kerja Pembantu Bupati Purwakarta Wilayah Purwakarta yang meliputi Wilayah Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Campaka, Perwakilan Kecamatan Cibungur yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta berada di Purwakarta. Sedangkan wilayah kerja Pembantu Bupati Wilayah Plered meliputi wilayah Kecamatan Plered, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Maniis, Kecamatan Sukatani yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta berada di Plered. Wilayah kerja Pembantu Bupati Wilayah Wanayasa yang meliputi Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Bojong, Perwakilan Kecamatan Kiarapedes, Perwakilan Kecamatan Margasari, dan Perwakilan Kecamatan Parakansalam yang pusat kedudukan

Pembantu Bupati Purwakarta Wilayah Wanayasa berada di Wanayasa yang telah diresmikan pada tanggal 31 Januari 1990 oleh Wakil Gubernur Jawa Barat. Setelah diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta dimulainya pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Purwakarta tepatnya pada tanggal 1 Januari 2001. Serta melalui Peraturan Daerah No. 22 tahun 2001, telah terjadi restrukturisasi organisasi pemerintahan di Kabupaten Purwakarta. Jumlah Dinas menjadi 18 Dinas, 3 Badan dan 3 Kantor serta Kecamatan berjumlah 17 buah, Kelurahan 9 buah dan desa 183 buah. Dibawah ini merupakan tabel para bupati yang pernah memimpin dalam sejarah perkembangan daerah Purwakarta.

Tabel 3.1 Para Bupati Karawang yang berkedudukan di Karawang

1. Tahun 1656-1679	Penembahan Singaperbangsa/Adipati Kertabumi IV/Eyang Manggung, berkedudukan di Udug-udug sebagai Bupati Pertama yang merintis pendirian kota Kerawang
2. Tahun 1679-1721	R. anom Wirasuta/RAA Panatayuda I, yang memindahkan ibukota ke Karawang. (Bupati II)
3. Tahun 1721-1731	R. Jayanagara/RA Panatayuda II (Bupati III)
4. Tahun 1731-1751	R. Singanagara/RA Panatayuda III (Bupati IV)
5. Tahun 1751-1786	R. Moh soleh/RA Panatayuda IV (Bupati V)
6. Tahun 1786-1811	RAA Singasari Panatayuda (Bupati VI)
7. Tahun 1811- (6 bulan)	RA Suriadilaga (Bupati VII)
8. Tahun 1811-1816	RA Sastradipura (Bupati VIII)

Tabel 3.2 Para Bupati Karawang yang berkedudukan di Purwakarta

1. Tahun 1820-1827	RA Surianata/Dalem Santri, yang menetapkan ibukota di Wanayasa, selanjutnya wafat dan dimakamkan di tengah Situ Wanayasa (Bupati IX/I)
2. Tahun 1827-1849	RA Suriawinata Dalem Sholawat yang memindahkan ibukota dari Wanayasa ke Sindangkasih dan selanjutnya memberi nama Purwakarta (Bupati X/II)

3. Tahun 1849-1854	R. Sastranegara/R. Moch. Enoch (Bupati XI/III)
4. Tahun 1854-1863	RAA Sastradiningrat I/Uyang Ayim yang membangun pendopo kabupaten, Mesjid Agung dan Situ Buleud (Bupati XII/IV)
5. Tahun 1863-1886	RAA Sastradiningrat II (Bupati XIII/V)
6. Tahun 1886-1911	R. Suriakusumah/RAA Sastradiningrat III (Bupati XIV/VI)
7. Tahun 1911-1925	RA Gandanegara, Bupati terakhir keturunan Singaperbangsa (Bupati XV/VII)
8. Tahun 1925-1942	Suriamiharja/Adipati Sangsakuning, Bupati terakhir sebelum pendudukan Jepang (Bupati XVI/VIII)
9. Tahun 1942-1945	R. Pandasuriadiningrat/Konco Bupati XVII/IX, saat pendudukan Jepang
10. Tahun 1945-1948	R. Juarsa, Bupati Karawang XVIII/X dan kemudian mengungsikan ibukota ke Subang.

Tabel 3.3 Para Bupati Purwakarta yang berkedudukan di Subang

1. Tahun 1948-1949	R. Ateng Supraja (Bupati Recomba, membawahi wilayah eks-Karawang Timur)
2. Tahun 1949-1950	RM. Hasan Suriasacakusuma, Bupati Recomba II
3. Tahun 1950-1958	RPS. Hadipranata, Bupati Kab. Purwakarta I berdasarkan UU No. 14 tahun 1950, sementara berkedudukan di Subang (Bupati Purwakarta I)
4. Tahun 1958-1959	M. Tanu Gandawidijaja, Pejabat Bupati (Bupati II)
5. Tahun 1959-1966	Tb. Mochamad Hasan Sutawinangun (Bupati III)
6. Tahun 1966-1968	Letkol. RHA Samsudin, Bupati Purwakarta IV, selanjutnya menjadi Bupati Subang I.

Tabel 3.4 Para Bupati Kabupaten Purwakarta yang berkedudukan di Purwakarta

1. Tahun 1968-1969	HS. Ronggowaluyo, Pejabat Bupati (Bupati V/I)
2. Tahun 1969-1979	Kol. Inf. RA. Muchtar (Bupati VI/I)
3. Tahun 1979-1980	Kol. Inf. RHA. Abubakar, Pejabat Bupati merangkap Residen Wilayah IV (Bupati VII/III)
4. Tahun 1980-1982	Letkol. AU. Drs. Mukdas Dasuki (Bupati VIII/IV)
5. Tahun 1982-1983	Kol. Inf. (Purn) RHA Abubakar ditunjuk kembali sebagai Pejabat Bupati merangkap Pembantu Gubernur Wilayah IV/Ka. Itwil Propinsi (Bupati IX/V)
6. Tahun 1983-1988	Drs. H. Soedarna TM, S.H. sebagai Bupati Purwakarta yang

	berkedudukan di Purwakarta. Bupati VI atau Bupati Kabupaten Purwakarta X sejak Kabupaten Purwakarta masih berkedudukan di Subang.
7. Tahun 1988-1993	Drs. H. soedarna TM, S.H sebagai Bupati Purwakarta VII yang kedua kalinya.
8. Tahun 1993-2003	Drs. H. Bunyamin Dudih, S.H, menjabat sebagai Bupati Purwakarta VIII.
9. Tahun 2003-sekarang	Drs. H. Lili Hambali Hasan, M.Si. Menjabat sebagai Bupati Purwakarta IX. (Untuk pertama kalinya, mempunyai Wakil Bupati, yaitu H. Dedi Mulyadi, SH)

3.2 Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

Visi dan Misi tersebut merupakan cita-cita dan obsesi seluruh warga masyarakat Kabupaten Purwakarta, yang menginginkan hidup dalam keadaan aman dan damai, dengan kehidupan politik dan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan, dengan masyarakat yang berkualitas, unggul, maju dan produktif, sehingga siap memasuki era persaingan global, guna mewujudkan kehidupan yang sejahtera dengan berlandaskan iman dan takwa menuju Purwakarta yang wibawa, karta, raharja.

Faktor kunci (*key succes factor*) yang terkandung dalam Visi Purwakarta tersebut terletak pada kalimat : “Wibawa Karta Raharja”. Secara terminologi kalimat “Wibawa Karta Raharja” terdiri atas tiga suku kata, yaitu “Wibawa” yang berarti berwibawa atau penuh kehormatan, suku kata “Karta” yang berarti ramai atau hidup, dan suku kata “Raharja” yang berarti keadaan sejahtera atau makmur. Sehingga “Wibawa Karta Raharja” dapat diartikan sebagai daerah yang terhormat/berwibawa, ramai/hidup, serta makmur atau sejahtera.

Pada tataran konsepsi pembangunan, Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang mendapat sorotan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Hal ini karena wilayah Purwakarta berada pada lintasan jalur transportasi dan perdagangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Jakarta, Bandung dan Cirebon, serta terdapat area yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) oleh Pemerintah Propinsi yaitu Cikopo-Cikampek. Oleh karenanya wilayah Cikopo-Cikampek merupakan daerah Segitiga Emas, atau merupakan pusat titik pertemuan tiga jalur arus yaitu Jakarta-Purwakarta-Bandung dan Jakarta-Purwakarta-Cirebon.

Visi

“Terwujudnya masyarakat Purwakarta yang aman, damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera berlandaskan iman dan taqwa menuju Wibawa Karta Raharja.”

Misi

- a) Mewujudkan budaya hukum dan tertib hukum demi terciptanya kesadaran, kepatuhan dan ketertiban hukum masyarakat.
- b) Menciptakan iklim politik yang kondusif bagi terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis berdasarkan nilai-nilai agama, etika, moral dan budaya Pancasila.
- c) Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan mengoptimalkan sumber daya daerah yang bertitik berat pada penguatan basis pertanian dan industri serta mengembangkan

mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat, di samping memfasilitasi berkembangnya PMA dan PMDN dalam rangka penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menghadapi persaingan global dengan mengoptimalkan keunggulan kooperatif.

- d) Mewujudkan sistem dan iklim pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia.
- e) Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.
- f) Meningkatkan pemerataan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.
- g) Meningkatkan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Arah Kebijakan Pembangunan

- Bidang Ekonomi

Arah kebijakan bidang ekonomi antara lain:

1. Meningkatkan upaya penyediaan modal untuk menjamin terpenuhinya kegiatan usaha, baik untuk lembaga keuangan, lembaga sosial masyarakat, usaha kecil, menengah ataupun koperasi.

2. Meningkatkan pengusahaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam usaha terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.
3. Mengusahakan terbangunnya pusat perdagangan (*trade centre*) dan penambahan sarana perdagangan baru (pasar-pasar baru).
4. Mengembangkan pertanian ke arah agribisnis dengan memperkuat sub sistem hulu tengah (pertanian dalam arti luas) dan hilir.
5. Mengembangkan industri kecil, khususnya yang berorientasi ekspor, baik industri manufaktur maupun agroindustri.
6. Meningkatkan peran sub sektor pariwisata dengan mengembangkan potensi obyek wisata unggulan.
7. Mendorong investasi sektor swasta pada sub sektor industri, perdagangan dan jasa berdasarkan peruntukan lahan yang diatur dalam rencana tata ruang.
8. Mendorong berkembangnya industri yang menghasilkan input bagi pertanian dan penanganan pasca panen, seperti: industri agro-otomotif, agro-kimia, pembibitan/pembenihan, industri makanan dan sejenisnya.
9. Meningkatkan program pengembangan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan melalui intensifikasi dan diversifikasi dan pemberdayaan usaha pertanian rakyat serta upaya lain yang dapat menunjang kinerja produksi pertanian di daerah.
10. Mendorong berkembangnya industri yang mengolah hasil pertanian, termasuk kegiatan perdagangan.

- Bidang Keamanan Dan Ketertiban

Arah kebijakan bidang ini, antara lain:

1. Melaksanakan pelatihan Sistem Keamanan Swakarsa.
2. Meningkatkan koordinasi antar-aparat penegak hukum dan dukungan politik dari DPRD dalam penegakan sanksi hukum.

- Pendidikan

Arah kebijakan bidang pendidikan, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengikuti pendidikan.
2. Merehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan.
3. Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga pendidikan.
4. Meningkatkan kualitas lembaga-lembaga pendidikan luar sekolah dalam merespon minat masyarakat pada pendidikan kejuruan.

- Bidang Sosial, Budaya, Kesehatan, Dan Kesejahteraan Sosial

Arah Kebijakan program kesehatan dan kesejahteraan sosial, antara lain:

1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan penerapan jaminan mutu pelayanan yang ditetapkan.
2. Menempatkan bidan-bidan desa, sehingga seluruh desa mempunyai bidan desa.
3. Meningkatkan penyehatan lingkungan permukiman, air bersih, tempat-tempat umum, industri, serta tempat pengelolaan makanan dan minuman.
4. Meningkatkan perilaku hidup sehat.
5. Menanggulangi dan mencegah penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif.

- Kebudayaan, Kesenian Dan Pariwisata

Arah kebijakannya, antara lain:

1. Mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur.
2. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis agronomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan.

3.2.1 Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Berdasarkan kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi yang dituangkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tugas Pemerintah Daerah di Indonesia adalah sebagai institusi yang melayani masyarakat sekaligus merupakan institusi politik.

Sedangkan fungsi Pemerintah Daerah diatur lebih rinci berdasarkan Peraturan Pemerintah berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, yaitu :

- Meningkatkan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Mengawasi, mengarahkan, mengendalikan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya di wilayahnya.

- Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan fasilitas dan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- Meningkatkan pemasukan pendapatan asli daerah, mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah serta menggali dan mengembangkan potensi di wilayahnya.
- Menggerakkan, mendorong dan membina masyarakat untuk berperan secara aktif dalam kegiatan pembangunan dan memelihara hasil-hasil pembangunan dalam usaha meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- Melaksanakan urusan-urusan pemerintahan lainnya yang ditugaskan oleh Pemerintah tingkat atasnya.

Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 pula, wewenang Pemerintah daerah adalah meliputi ;

- Pekerjaan Umum
- Manajemen Kesehatan
- Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
- Pembangunan Pertanian
- Transportasi
- Peraturan Kegiatan Manufaktur dan Perdagangan
- Peraturan Investasi
- Urusan Lingkungan Hidup
- Manajemen Tanah
- Koperasi

- Pembangunan Sumber Daya Manusia

3.3 Susunan Organisasi

Pembentukan dan susunan organisasi Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 22 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta, yang terdiri dari :

- I. Sekretaris Daerah, yang membawahi:
 - A. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, yang membawahi :
 - Bagian Pemerintahan Umum
 - Bagian Pemerintahan Desa
 - Bagian Kesbang dan Linmas
 - Bagian Hukum
 - B. Asisten Sekda Bidang Pembangunan, yang membawahi :
 - Bagian Ekonomi
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - Bagian Pembangunan
 - Bagian Humas
 - C. Asisten Sekda Bidang Administrasi, yang membawahi :
 - Bagian Keuangan
 - Bagian Umum
 - Bagian Perlengkapan

- Bagian Organisasi dan Tata Laksana

II. Sekretaris DPRD, yang membawahi :

- A. Bagian Humas
- B. Bagian Rapat dan Risalah
- C. Bagian Keuangan
- D. Bagian Humas dan Protokol

III. Dinas, yang terdiri dari :

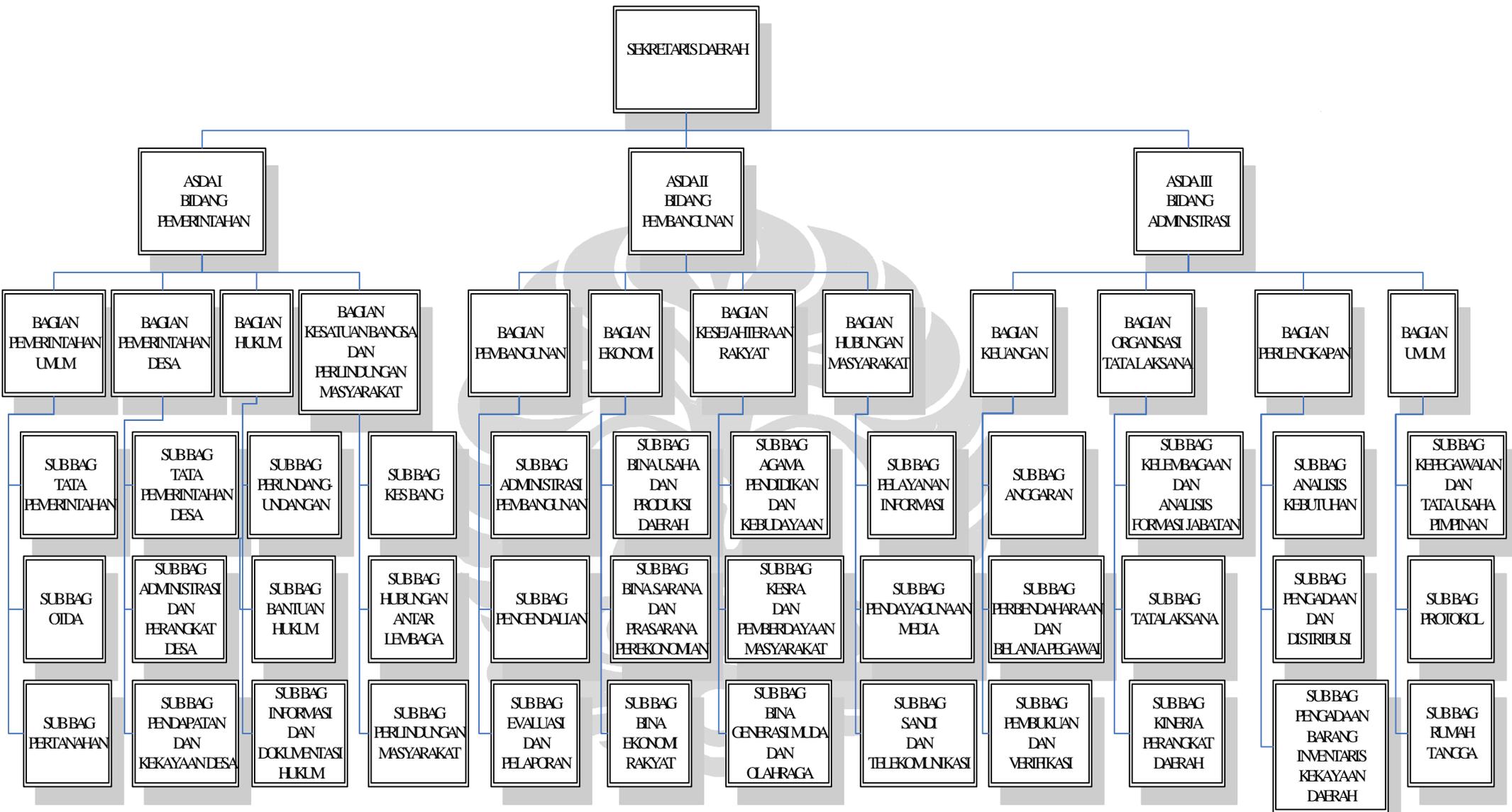
1. Dinas Bina Marga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pendidikan
4. Dinas Perhubungan
5. Dinas Pendapatan Daerah
6. Dinas Tenaga Kerja
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
8. Dinas Pertanian dan Perkebunan
9. Dinas Peternakan dan Perikanan
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal
11. Dinas Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam
12. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
13. Dinas Cipta Karya dan Pengairan
14. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

IV. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri :

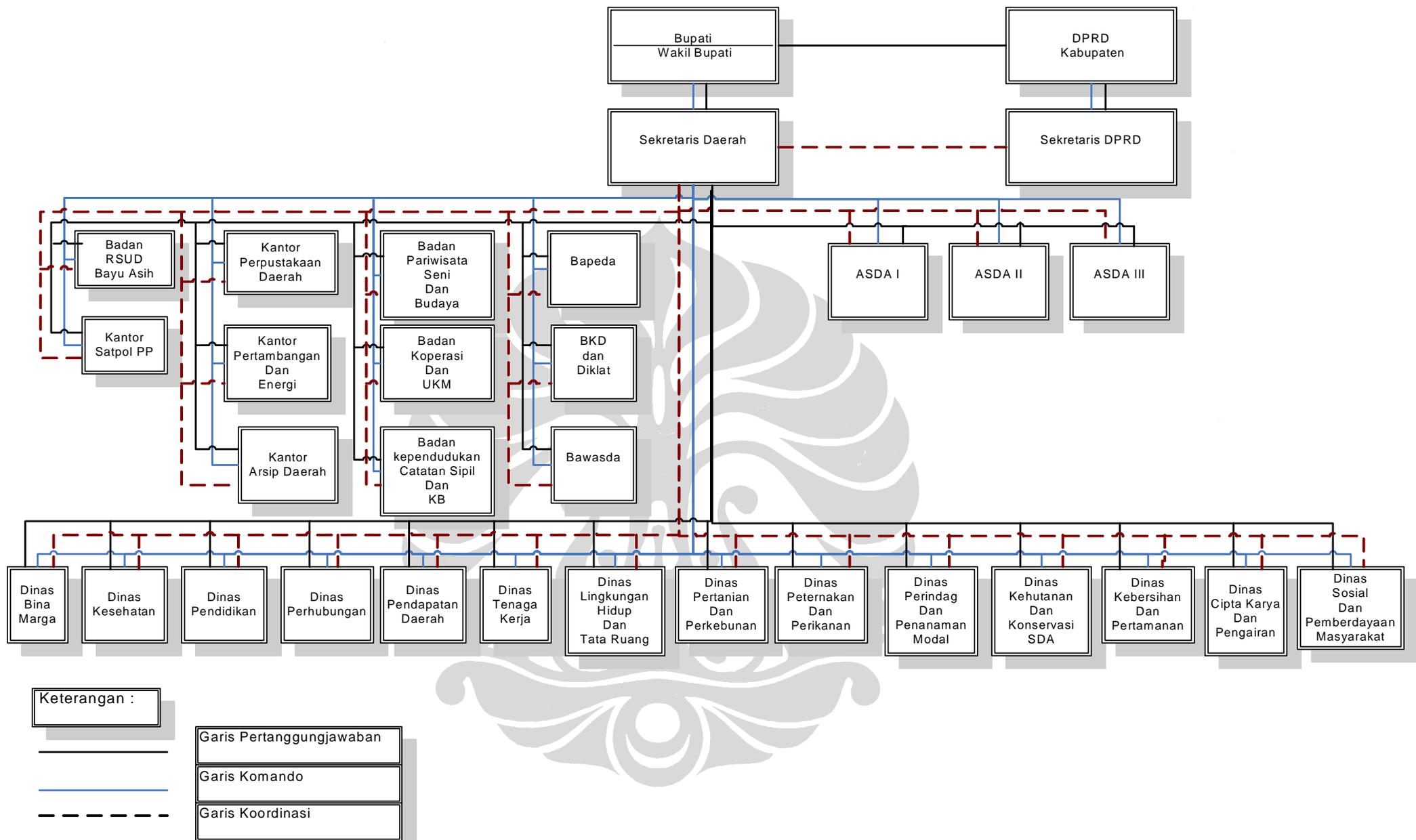
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Pengawas Daerah

3. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
4. Badan RSUD Bayu Asih
5. Badan Pariwisata, Seni, dan Budaya
6. Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB
7. Badan Koperasi dan UKM
8. Kantor Arsip Daerah
9. Kantor Perpustakaan Daerah
10. Kantor Pertambangan dan Energi
11. Kantor Satpol PP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta No. 5 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta dan kemudian disempurnakan dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Purwakarta, sedangkan yang dimaksud dengan Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah dengan jajarannya seperti yang tergambar dibawah ini.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purwokarta



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

3.3.1 Pemerintahan Daerah

Penjelasan tentang Pemerintahan Daerah dituangkan didalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi, serta pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- c) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d) Penyediaan sarana dan prasarana umum;

- e) Penanganan bidang kesehatan;
- f) Penyelenggaraan pendidikan;
- g) Penanggulangan masalah sosial;
- h) Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j) Pengendalian lingkungan hidup;
- k) Pelayanan pertanahan;
- l) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m) Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n) Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

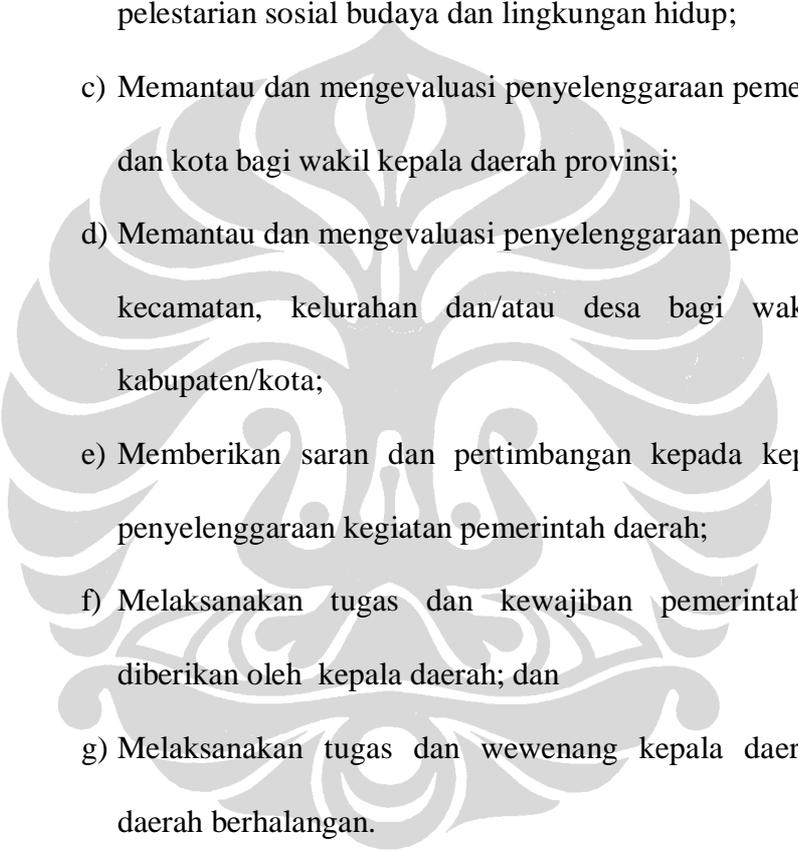
3.3.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Aturan tentang Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah tercantum pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004, pasal 24 sampai dengan pasal 27. Kepala daerah sebagaimana dimaksud untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Kepala daerah sebagaimana dimaksud dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Adapun Tugas dan Wewenang dari Kepala Daerah adalah :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b) Mengajukan rancangan Perda;
- c) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Wewenang dari Wakil Kepala Daerah adalah :

- 
- a) Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
 - b) Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
 - c) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
 - d) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
 - e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
 - f) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
 - g) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Kewajiban dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, adalah :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
5. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
10. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
11. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud, Kepala Daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati atau Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

3.3.3 DPRD

Kedudukan dan fungsi DPRD diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004, pasal 40. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a) Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b) Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
- d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;

- e) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i) Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- j) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- k) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

DPRD mempunyai hak:

- a) Interpelasi;
- b) Angket; dan
- c) Menyatakan pendapat.

Anggota DPRD mempunyai hak:

- a) Mengajukan rancangan Perda;
- b) Mengajukan pertanyaan;
- c) Menyampaikan usul dan pendapat;
- d) Memilih dan dipilih;
- e) Membela diri;

- f) Imunitas;
- g) Protokoler; dan
- h) Keuangan dan administratif.

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- e) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- g) Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
- h) Menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;
- i) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

3.3.4 Sekretariat Daerah

Aturan tentang Sekretariat Daerah diatur dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, pasal 121. Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Apabila sekretaris daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah.

3.3.5 Sekretariat DPRD

Aturan tentang Sekretariat DPRD diatur dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, pasal 123. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD.

Adapun tugas dari Sekretariat DPRD adalah :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
4. Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud huruf “d” diatas wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi sekretariat DPRD ditetapkan dalam peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

3.3.6 Dinas Daerah

Aturan tentang Dinas Daerah dituangkan dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004, pasal 124 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 5 tahun 2002, serta Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 22 Tahun 2000.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah, Pemerintah Kabupaten Daerah Purwakarta, memiliki 14 Dinas Daerah, yang terdiri dari :

1. Dinas Bina Marga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pendidikan
4. Dinas Perhubungan

5. Dinas Pendapatan Daerah
6. Dinas Tenaga Kerja
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
8. Dinas Pertanian dan Perkebunan
9. Dinas Peternakan dan Perikanan
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal
11. Dinas Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam
12. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
13. Dinas Cipta Karya dan Pengairan
14. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

3.3.7 Lembaga Teknis Daerah

Aturan tentang Dinas Daerah dituangkan dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004, pasal 125 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 5 tahun 2002, serta Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 22 Tahun 2000.

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah.

Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah

sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah, Pemerintah Kabupaten Daerah Purwakarta, memiliki 11 Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Pengawas Daerah
3. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
4. Badan RSUD Bayu Asih
5. Badan Pariwisata, Seni dan Budaya
6. Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB
7. Badan Koperasi dan UKM
8. Kantor Arsip Daerah
9. Kantor Perpustakaan Daerah
10. Kantor Pertambangan dan Energi
11. Kantor Satpol PP

3.4 Kondisi dan Potensi Daerah Kabupaten Purwakarta

Kondisi dan Potensi ini dilihat dari berbagai sisi potensi yang dimiliki oleh Daerah Kabupaten Purwakarta, seperti penjelasan dibawah ini :

1. Posisi Geografis

Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari Wil. Propinsi Jawa Barat yang terletak diantara 107o30' - 107o40' BT dan 6o25' - 6o45' LS. Secara administratif, Kab. Purwakarta mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a) Bagian Barat dan sebagian wilayah Utara berbatasan dengan Kab. Karawang.
- b) Bagian Utara dan sebagian wilayah bagian Timur berbatasan dengan Kab. Subang.
- c) Bagian Selatan berbatasan dengan Kab. Bandung.
- d) Bagian Barat Daya berbatasan dengan Kab. Cianjur

Kabupaten Purwakarta berada pada titik-temu tiga jalur utama lalu-lintas yang sangat strategis, yaitu jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon yang merupakan jalur utama ke wilayah Jawa Tengah.

Luas wilayah Kab. Purwakarta tercatat 971,72 km² atau sekitar 2,81 persen dari luas wilayah Prop. Jawa Barat. Sejak Januari 2001, Kab. Purwakarta mempunyai 17 kecamatan dengan 192 desa/kelurahan (183 desa dan 9 kelurahan). Jarak antara Kecamatan bervariasi, dimana jarak terdekat sepanjang 4 km terdapat antara Kec. Sukatani dengan Kec. Plered. Sementara jarak terjauh adalah 60 km yang terdapat antara kecamatan Bojong dengan Kecamatan Sukasari.

2. Pembagian Wilayah Menurut Aspek Geografis

Ditinjau dari aspek geografis, letak Kab. Purwakarta dapat dibagi atas beberapa wilayah, yaitu bagian Utara, Barat, Selatan dan Timur. Wilayah Bagian Utara mencakup Kecamatan Campaka, Bungursari, Cibatu, Purwakarta, Babakancikao, Pasawahan, Podoksalam, Wanayasa dan Kiarapedes, dimana sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian antara 25-500 m di atas permukaan laut (dpl). Wilayah Barat meliputi Kecamatan Jatiluhur dan Sukasari, dimana bagian yang merupakan permukaan air Danau Ir. H. Juanda mempunyai ketinggian 107 m dpl, sedangkan tanah daratan di sekitarnya berada pada ketinggian sekitar 400 m dpl. Kab. Purwakarta Bagian Selatan dan Timur,

wilayahnya meliputi Kec. Plered, Maniis, Tegalwaru, Sukatani, Darangda dan Kec. Bojong, dengan ketinggian lebih dari 200 m dpl.

3. Iklim Dan Tata Air

Kondisi iklim di Kab. Purwakarta termasuk pada zona iklim tropis, dengan rata-rata curah hujan 3.093 mm/tahun dan terbagi ke dalam 2 wilayah zona hujan, yaitu: Zona dengan suhu berkisar antara 22°-28° dan zona dengan suhu berkisar 17°-26°.

Zona mata air di Kab. Purwakarta yang berpengaruh terhadap keseimbangan air permukaan wilayah regional terdapat di Gunung Burangrang, Sanggabuana, Pegunungan Parang, Pasir Kutangandak di Kec. Wanayasa dan Pasir Madang di Kec. Campaka.

Zona air tanah merupakan zona air tanah sedang sampai dangkal, terdapat di wilayah Sungai Cikao Kec. Purwakarta, Plered dan Campaka, serta zona air tanah dalam terdapat di wilayah Kec. Darangdan dan Wanayasa. Zona air permukaan berupa air sungai dan air genangan. Sungai terbesar yang terdapat di Kab. Purwakarta adalah sungai Citarum dan Sungai kecil meliputi Sungai Cikao, Sungai Ciherang dan Sungai Cilamaya. Air genangan yang terdapat di Kab. Purwakarta adalah Waduk Ir. H. Juanda dan sebagian Waduk Cirata.

4. Geologi Dan Bahan Tambang

Kondisi geologi di Kab. Purwakarta terdiri dari batuan sedimen klasik, berupa: batu pasir, batu gamping, batu lempung, batuan vulkanik (turf, breksi vulkanik, batuan beku terobosan, batu lempung napalan, konglemerat dan napal). Batuan beku terobosan terdiri dari andesit, diorit, vetrofir, basal dan gabro. Batuan

tersebut umumnya bertebaran di sebelah Barat Daya wilayah Kab. Purwakarta. Jenis batuan napal, batu pasir kuarsa merupakan batuan yang tertua di Kab. Purwakarta dengan lokasi sebaran di tepi Waduk Ir. H. Juanda dan batu lempung yang berumur lebih muda (Miosen) tersebar di wilayah Barat Laut bagian Timur Kab. Purwakarta dan endapan gunung api tua yang berasal dari Gunung Burangrang, Gunung Sunda berupa tuf, lava andesit basaltis, breksi vulkanik dan lahar. Di atas batuan ini diendapkan pula hasil erupsi gunung api muda yang terdiri dari batu pasir, lahar, lapili, breksi, lava basal, aglomerat tufan, pasir tufa, lapili dan lava scoria.

Bahan galian yang terdapat di wilayah Kab. Purwakarta diantaranya adalah: batu kali, batu pasir, batu andesit, batu gamping, lempung, pasir, pasir kuarsa, sirtu, tras, posfat, barit dan gips.

5. Topografi & Ketinggian

Berdasarkan kondisi topografinya, Kab. Purwakarta secara umum mempunyai kemiringan antara 2-15%, sebesar 34,8% dari seluruh wilayah; kelas lereng antara 15-40%, sekitar 33,13% dari luas seluruh wilayah.

Kabupaten Purwakarta terletak pada ketinggian lahan antara 40 meter dpl di bagian Utara dan 2.064 meter dpl terdapat di bagian Tenggara (Gunung Burangrang).

6. Jenis Tanah & Penggunaan Lahan

Jenis tanah yang ada di Kab. Purwakarta mengacu pada peta tinjauan skala 1 : 250.000 (CPT Bogor), meliputi: aluvial, latosol, andosol, grumosol, podsolik dan regosol.

Penggunaan Lahan diantara adalah untuk perkampungan/perkotaan, sawah, kebun campuran, perkebunan, tegalan, hutan, padang rumput, alang-alang dan situ/waduk.

Pola penggunaan lahan perkampungan/perkotaan di Kab. Purwakarta bersifat linier sepanjang ruas-ruas jalan negara, propinsi dan kabupaten. Di samping itu penggunaan perkampungan/perkotaan terutama terkonsentrasi pada pusat-pusat pertumbuhan seperti Kota Purwakarta, Jatiluhur dan Plered. Penggunaan lahan berupa sawah tersebar hampir pada semua kecamatan yang ada, begitu pula dengan penggunaan lahan berupa kebun campuran.

Lahan perkebunan terletak di Kec. Darangdan, Bojong Campaka dan Jatiluhur, sedangkan tegalan terdapat di Kec. Sukatani dan Campaka. Lahan hutan sebagian besar terletak di Kec. Campaka, Wanayasa, Pasawahan, Jatiluhur dan Maniis. Penggunaan lahan untuk kawasan Industri terletak di Kec. Jatiluhur, Purwakarta, Babakancikao dan Campaka.

7. Komposisi Pemanfaatan Ruang

No.	Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)	%
1.	Hutan Produksi	16.920,00	17,41
2.	Tanaman Perkebunan/tahunan	20.347,82	20,94
3.	Permukiman	11.202	11,53
4.	Kawasan Industri	2.000,00	2,06
5.	Zona Industri	3.187,24	3,28
6.	Peternakan	155,48	0,16
7.	Kawasan Pariwisata	9.250,77	9,51
8.	Hutan Lindung	2.881,47	2,97
9.	Perikanan/waduk	9.764,78	10,05
10.	Tanaman Pangan Lahan Basah	20.733,46	21,34
11.	Tanaman Pangan Lahan Kering	728,79	0,75
J U M L A H		97.172,00	100,00

